

Pembelian Tanah RS Sumber Waras Menyimpang

AKTUAL

Edisi 47 | 03 - 17 Januari 2016

SENGKARUT PELINDO II

Sengkabut Pelindo II akan jadi bola salju politik
yang akan tetap ramai di tahun 2016



ISSN 2337-8395



9 772337 839509

WWW.AKTUAL.COM

Rp 30.000



Swastanisasi PLN

...ikungan kapitalisme global sejak pasca swastanisasi kelistrikan di Indonesia Bank Dunia sejak 1997, agaknya jadi memasuki zona merah neoliberalisme.

Misalnya, ketika pertumbuhan ekonomi diprediksi bakal mencapai 8 persen per tahun, maka perkiraan pertumbuhan kelistrikan adalah 10 persen. Ini yang disebut adalah defisit meter kontraksi sebesar 20 persen atau pertumbuhan kontraksi sebesar dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional, tinggalkan akan terjadi defisit energi listrik.

Kelistrikan tersebut berhasil. Terbukti bahwa kelistrikan swasta dengan modal asing dan pemerintah PLN yang kemudian dengan modal asing...

Independence Power Producers (IPP). Maka, kelistrikan swasta merupakan modal asing yang masuk ke Indonesia.

Pada tahun 1997, PLN yang saat itu adalah BUMN, menyerahkan sebagian dari seluruh kelistrikan nasional kepada perusahaan swasta asing. Seperti apa yang terjadi pada saat itu, PLN menyerahkan sebagian dari seluruh kelistrikan nasional kepada perusahaan swasta asing. Seperti apa yang terjadi pada saat itu, PLN menyerahkan sebagian dari seluruh kelistrikan nasional kepada perusahaan swasta asing.

...kembali aksi para perancang ekonomi di Washington dalam meliberalisasikan dan swastanisasi kelistrikan Indonesia. Rencana makro kelistrikan dan baru menemukan momentumnya privatisasi PLN pada 1997, setahun menjelang kejatuhan Presiden Suharto pada Mei 1998.

Kalau kita menilik kembali aksi subversif korporasi-korporasi energi global AS melalui IMF dan Bank Dunia, sebenarnya mereka sudah mengincar sektor tenaga-listrikan Indonesia sejak 1970-an. Lagi-lagi perkins punya cerita menarik tentang soal ini. Waktu itu, Pemerintahan Suharto sempat menerapkan Proyek Sepintas Kalau Desa atau Prolisdes, mata, gagasan tersebut sangat kasat mengingat yang disasar dari mulia ini adalah masyarakat desa. Menurut agenda yang sesungguhnya, menurut pengakuan Perkins, Prolisdes merupakan salah satu strategi CIA untuk memprovokasi pemerintah Indonesia agar terjebak dalam skema utang luar negeri dengan dalih untuk peningkatan rasio elektrifikasi.

Selain itu, juga melalui skema didorong agar membangun Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA), tenaga panas bumi (PLTP), tenaga uap dengan bahan bakar batu bara (PLTU), tenaga uap berbahan bakar...

kemudian di Alhasil, mencari dan investasi di campur tangan ekonomi per sektor. Pengganda dari ke d. Sebat terga energi dume.

Tentu saja kerja dari para perancang ekonomi di Washington dalam meliberalisasikan dan swastanisasi kelistrikan Indonesia. Rencana makro kelistrikan dan baru menemukan momentumnya privatisasi PLN pada 1997, setahun menjelang kejatuhan Presiden Suharto pada Mei 1998.

Kalau kita menilik kembali aksi subversif korporasi-korporasi energi global AS melalui IMF dan Bank Dunia, sebenarnya mereka sudah mengincar sektor tenaga-listrikan Indonesia sejak 1970-an. Lagi-lagi perkins punya cerita menarik tentang soal ini. Waktu itu, Pemerintahan Suharto sempat menerapkan Proyek Sepintas Kalau Desa atau Prolisdes, mata, gagasan tersebut sangat kasat mengingat yang disasar dari mulia ini adalah masyarakat desa. Menurut agenda yang sesungguhnya, menurut pengakuan Perkins, Prolisdes merupakan salah satu strategi CIA untuk memprovokasi pemerintah Indonesia agar terjebak dalam skema utang luar negeri dengan dalih untuk peningkatan rasio elektrifikasi.

Selain itu, juga melalui skema didorong agar membangun Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA), tenaga panas bumi (PLTP), tenaga uap dengan bahan bakar batu bara (PLTU), tenaga uap berbahan bakar...

Bongkar Kasus Korupsi, Komisi I

Pansus Pelindo

Polemik Pencopotan Buwas DPR: Ri Lino Seolah-Olah Bisa Atur Negara

Kebakaran Terjadi di RSJ Athena

Prabowo Dijak Gak PNS Tidak

Pertama Kali Dalam Sejarah Politik Ditembuskan ke Me

Horat Putusan Mutasi, AB

Awak Dana Pensiun dan Asuransi

Ambas Untuk Buy Back Saham

Berita teraktual tersaji,
untuk Anda mengawali hari ...

Info Dan Pemasaran :
☎ 0812 053 8776 (Deddy) | 0838 210 4469 (Ranie) | 0818 2809 41 009 (Rhiza)
✉ iklan@aktual.com | marketing@aktual.com | sirkulasi@aktual.com
🌐 www.aktual.com

PENDIRI M Danial Nafis

KOMISARIS Yudi Latif

PEMIMPIN REDAKSI Faizal Rizki Arief

SEKRETARIS REDAKSI Tsurayya Zahra

REDAKTUR SENIOR Satrio Arismunandar,

Hendrajit, Eko Maryadi

SIDANG REDAKSI Faizal Rizki Arief, Satrio

Arismunandar, Hendrajit, Wahyu Romadhony

REDAKTUR Wahyu Romadhony, Nebby

Mahbubirrahman, Sukardjito, Ismed Eka

Kusuma, Tino Oktaviano (Foto)

ASISTEN REDAKTUR Zaenal Arifin, M Vidia

Wirawan, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu

Yusep, Arbie Marwan

STAF REDAKSI Soemitro, Fadlan Syam Butho,

Nailin In Saroh, Mochammad Zaky Kusumo,

Novrizal Sikumbang, Dadang Sah, Agung Rizki,

Warnoto (TV), Junaidi (Foto), Munzir (Foto),

Leonina K Lahama, Najamuddin Arfah, Refli

Mulyadi, Eko Sumaryanto (Foto Komersial)

DESAIN GRAFIS Shofrul Hadi, Nelson Nafis

NETWORK Tri Wahyudi (Hd), Rendra

SMC Taufik, Iqbal Maulana

KONTRIBUTOR LUAR NEGERI Fitra Ismu

(Meksiko)

REPORTER DAERAH Masriadi Sambo

(Aceh), Damai Oktavianus Mendrota (Medan),

Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris

B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah

(Malang), A, Bobby Andalan (Denpasar), Andri

Wawan MS Husen (Palu), Vina Fatma Sari

(Bandung), Labib Zamani (Yogyakarta)

DIREKTUR OPERASIONAL Rinrin

Sukmariana

MANAGER KEUANGAN Kasep Natakusumah

STAF KEUANGAN Zulkarnain, Vinka H P

HRD & KESEKRETARIATAN Nuryana

SIRKULASI Widhi Maulana, Bayu Aji

MARKETING OFFICER Dedy Kusnaedi,

Rhiza Aditya

ALAMAT REDAKSI

Graha Aktual: Jl. Tebet Barat VIII no.50 Jakarta

Selatan, Indonesia Kode pos: 12810

Telp. 021 83794508 (Hunting)

Fax. 021 83794706

redaksi@aktual.com

iklan@aktual.com

aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

aktual
MEDIA



Sengkarut di Pelindo

Pembaca yang budiman, Akhir tahun ini kondisi ekonomi politik sangat tidak menggembirakan. Banyak sekali kegaduhan politik dan ekonomi terjadi. Di bidang hukum pun ada banyak catatan yang sangat tidak menggembirakan.

Beberapa kasus sangat sensitif muncul di penghujung akhir tahun ini. Aktual mencatat ada dua kasus sensitif yakni kasus Freeport dan Pelindo. Kasus Freeport kami sudah membahasnya di edisi lalu.

Kini giliran kasus Pelindo. Laporan Utama kali ini, kami menyajikan soal sengkarut Pelindo. Kasus ini mencapai puncaknya ketika Direktur RJ Lino diberhentikan setelah Rekomendasi Pansus Pelindo di DPR memberi rekomendasi untuk memberhentikan Lino.

Namun yang menarik, KPK dan Polri bahkan juga masuk dan mencium aroma tidak sedap di dalam kasus ini dengan sangkaan yang berbeda. Artinya, kalau terbukti Lino melakukan korupsi

maka KPK bisa menuntutnya. Dan hal yang sama, Kepolisian juga bisa menuntutnya.

Yang sangat menarik di kasus ini adalah dugaan keterlibatan beberapa petinggi negara dan lingkungan Istana. Sengkarut Pelindo tidak lagi soal Rj Lino, tapi siapa saja yang diuntungkan oleh RJ Lino. Ini jadi bola salju politik yang akan tetap ramai di tahun 2016.

Dalam Rubrik Hukum, isu yang sangat menarik adalah kasus hukum di Rumah Sakit Sumber Waras yang diduga bisa menyeret Gubernur DKI Jakarta yang kerap dipanggil Ahok itu. Kasus ini menjadi menarik karena laporan BPK menyatakan bahwa ada kerugian negara dalam proses pembelian rumah sakit tersebut oleh Pemprov DKI. Keterlibatan Gubernur Ahok di kasus ini diduga amat besar.

Kami juga menyajikan beberapa artikel laian yang hangat buat pembaca.

Selamat Tahun Baru 2016...

Redaksi

Laporan Utama

24 Pak JK, Sudahlah...

Presiden Joko Widodo wajib hukumnya memberhentikan Rini Soemarno dari jabatannya sebagai Menteri BUMN. Bila Presiden bergeming atas rekomendasi Pansus Pelindo II, bisa berujung pada pemakzulan.



28 "Dwelling Time" dan Konflik Kepentingan di Pelindo II

Pelindo II dan pihak swasta pengelola TPS justru punya kepentingan yang sama untuk memperlama "dwelling time."



30 Susahnya Menggusur Rini Sang "Pemain Samping Serba Guna"

Menggusur Rini Sumarno? Nah ini jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan banyak kalangan.



14 AKTUAL REVIEW

Musibah Jatuhnya Pesawat T-50i TNI AU

Jatuhnya pesawat TNI AU selama ini sering dikaitkan dengan pernyataan bahwa alutsista itu sudah usang atau terlalu tua. Sehingga "wajar" jika jatuh, karena masa pakainya sudah kadaluwarsa. Namun, untuk pesawat T-50i pernyataan itu tidak akurat, karena pesawat ini belum lama bergabung dengan TNI AU. Ini juga pesawat yang dibeli dalam keadaan baru, bukan pesawat bekas pakai.

34 HUKUM

Pembelian Tanah RS Sumber Waras Menyimpang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui hasil audit investigasinya khusus untuk pembelian tanah RS SW menyimpulkan adanya enam penyimpangan, mulai dari tahap perencanaan, pembentukan harga hingga penyerahan hasil.

40 EKONOMI

Evaluasi Kinerja 2015 Tak Sesuai Harapan, SKK Migas Berharap 2016 Lebih Baik Lagi

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memberi catatan, sepanjang tahun 2015 ini pada sektor Migas, pemerintah masih belum mampu menyediakan infrastruktur yang memadai sebagai sarana memfasilitasi peningkatan penyerapan domestik.

44 INTERNASIONAL

Indonesia Tolak Bergabung di Koalisi Militer Saudi

Indonesia menolak bergabung dalam koalisi militer Islam yang digalang Arab Saudi. Selain hal itu bertentangan dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia tak ingin terseret arus konflik perkebuan di Timur Tengah.

46 LIFE

Cegah dan Sembuhkan Kanker dengan Metode AMAS

Saat ini ada metode sederhana dalam mencegah sekaligus menyembuhkan kanker yang disebut "AMAS Test" (Anti-Malignant Antibody Serum test), sangat bermanfaat untuk 'skrining' dan memonitor kanker. Yang terbaik dari cara ini yakni, relatif murah dalam hal biaya serta sangat akurat 95 persen.

Google play

CMN Aktual

Kategori Beras

CMN Aktual

Aplikasi Saya

Toko

Game

Keluarga

Panduan Orang Tua

Pilihan Editor

Aktual.com

CMN Aktual Berita & Majalah

★★★★★

Daftar Keinginan Pasang

Menu

- Terbaru
- Kategori
- Pengaturan
- Tentang
- Sosial
- Facebook
- Twitter

Detail

Tambang Redaksi Bulan Depan

Pertemuan Terapkan B-20, Impor BBM Hemat USD1,9 M

Ketua Komnas PA: Tidak Ada Penyerahan Anak untuk Bekerja

Polisi Tangkap Pelaku Pemalsuan Dokumen Target Pejabat Lembaga

Jakarta, 11 Januari 2016 - Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dai Sudjato mengatakan peningkatan penggunaan biodiesel 50 persen (mendekati B-20) ke dalam bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar, mulai pada tahun depan Pertamina dapat menghemat impor BBM hingga USD1,9 miliar.

Lengkapi kebutuhan informasi terkini dengan mengunduh Portal berita Aktual di smartphone Android Anda. Berita tersaji selama 24 jam dalam 7 hari seminggu dengan standar jurnalisme berkualitas yang meliputi berbagai peristiwa nasional maupun internasional.

3	Tatap Redaksi	12	Lensa Aktual	38	Kilas Hukum
5	Terkini	16	Kilas Nasional	42	Kilas Ekonomi
6	Kaki Hari	20	Kilas Politik	50	Oase



Menteri BUMN Benarkan Telah Copot RJ Lino

Kementerian BUMN membenarkan bahwa telah memberhentikan Richard Joost Lino sebagai Direktur Utama PT Pelindo II (IPC). Pemberhentian ini berkaitan dengan kasus hukum yang menimpa RJ Lino dan Direktur Pelindo II Ferialdy Noerlan.

Sesuai prosedur, Dewan Komisaris pun telah menyampaikan pertimbangannya kepada Kementerian BUMN. Langkah Dewan Komisaris ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan perseroan bisa tetap berjalan dengan optimal. Untuk itu keduanya diminta agar tidak dibebani tugas untuk mengelola perusahaan karena masalah hukum yang dihadapinya.

Oleh karena itu, Menteri BUMN Rini Soemarno pun memutuskan untuk memberhentikan keduanya dengan hormat dari jabatannya.

"Biarlah mereka dapat berkonsentrasi menyelesaikan kasus hukum masing-masing," kata Rini dalam siaran persnya, Jakarta, Rabu (23/12).

Kemudian, Rini pun menginstruksikan kepada Dewan Komisaris Pelindo II untuk menunjuk anggota direksi yang ada sementara

guna menjabat sebagai pelaksana tugas direktur utama dan direktur sampai terpilih direktur utama dan direktur yang definitif.

Sebagaimana diketahui RJ Lino dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus pengadaan Quay Container Crane tahun 2010, sementara Ferialdy Noerlan dinyatakan sebagai tersangka kasus pengadaan mobil crane 2013 oleh Bareskrim Polri. */Ismed Eka Kusuma*

James R. Moffett Mundur Jadi Bos Besar Freeport

James R. Moffett Direktur utama (Executive Chairman) sekaligus pendiri perusahaan Freeport-McMoRan mengundurkan diri dari jabatannya.

Demikian dikutip dari laman AP yang ditulis pada Senin (28/12).

Pengunduran diri Moffet akibat dari menurunnya harga komoditas andalan perusahaan tambang yang berbasis di Amerika Serikat tersebut.

Moffet yang ikut mendirikan Freeport-McMoran pada tahun 1969 itu, rencananya baru resmi mundur pada hari Kamis (31/12) mendatang.

Jim Bob biasa disapa itu akan digantikan oleh Direktur Independen Gerald J Ford. Sementara Richard C

Adkerson tetap di posisi CEO.

Sepanjang 2015, harga kedua komoditas unggulan Freeport yakni emas dan tembaga terus terjun bebas yang membuat pihak Freeport terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran terhadap karyawannya.

Sementara, nilai saham Freeport sendiri terus menurun, pada perdagangan hari Senin (28/12) di lantai bursa harga saham perusahaan yang memiliki operasi tambang emas di Indonesia itu turun hingga 61 sen atau sekitar 8,1 persen menjadi USD 6,95 per lembar.

Pada bulan Agustus lalu, Freeport mengumumkan rencana efisiensi besar-besaran yang mencakup pemotongan belanja, produksi dan sekitar 10 persen dari tenaga kerjanya.

Perlu diketahui, James R. Moffett alias Jim Bob juga beken di Tanah Air karena polemik surat Menteri ESDM Sudirman Said yang menyatakan bahwa pemerintah sudah menyetujui perpanjangan kontrak Freeport. Surat tersebut ditujukan Sudirman kepada Jim Bob.

Belakangan dia juga santer dikabarkan pernah bertemu salah seorang anggota keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun belum jelas apa maksud dan tujuan pertemuan itu. */Sukardjito*





Basis Budaya Pengembangan Teknologi dan Industri

Pembangunan dan perkembangan teknologi, baik untuk alasan kemakmuran ataupun demi mencegah dampak negatifnya, tidak bisa ditundukkan hanya pada prinsip-prinsip keteknikan atau rasio instrumental semata. Idealnya, perkembangan ini harus ditarik ke jangkar sosio-kultural tempat dialog-dialog konsensual dilakukan.

Hal ini penting karena teknologi tidak sekadar persoalan perangkat keras, melainkan juga menyangkut sistem nilai, aspek ideasional dan daya estetik-puitik dari komunitasnya. Teknologi terlalu berharga untuk diserahkan hanya kepada segelintir elite politik, komersial, dan keilmuan. Manusia Indonesia perlu dijadikan sadar akan kebudayaan. Ia secara aktif harus turut memikirkan dan merencanakan arah yang akan ditempuh oleh kebudayaan dalam rangka mendorong perkembangan iptek.

Apabila kita arahkan ingatan kita jauh ke belakang, lalu bergerak ke depan untuk memotret kinerja pembangunan hingga saat ini, segera muncul pertanyaan di benak kita: Apa sesungguhnya yang keliru dalam proses pembangunan di negeri ini? Kekayaan alam tidak mewariskan kemakmuran, kelimpahan penduduk tidak menjadi kekuatan pengubah, dan keanekaragaman kultural tidak mendorong semangat penggubah.

Ini negeri, kekayaan alamnya nomor tiga di dunia. Tetapi di negeri seruah ini, tantangan pembangunan masih berkisar pada persoalan-persoalan mendasar: keperluan mengurangi angka kemiskinan, kemampuan menyediakan lapangan kerja, penyediaan air bersih, dan kenyataan makin bubarahnya keseimbangan ekosistem.

Ini negeri, juga dikenal sebagai “the mega-biodiversity”. Tetapi, di negeri yang keragaman hayatinya nomor wahid di dunia ini, telah terlampau banyak materi dan pengetahuan biota laut, dan kekayaan hutan tropisnya, yang terkuasai negara-negara maju dengan imbalan yang murah. Peran kita dalam pemanfaatannya, boleh dibilang sekadar pemasuk serbuk obat ke dalam selungkup kapsul yang diciptakan pihak luar.

Sudah satu abad lamanya John Maynard Keynes (1883-1946) berteori bahwa pertumbuhan penduduk akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Tetapi kita tampaknya masih perlu bersabar untuk dapat melihat hal itu terbukti di sini. Catatan pembangunan di negeri ini memang menunjukkan angka pertumbuhan yang terus meningkat.

Tetapi utamanya bukan karena faktor sumberdaya insani, melainkan lebih karena pemborosan sumberdaya alam yang kelewat batas. Sementara itu, faktor pendukung

sendiri masih sering dianggap sebagai masalah ketimbang sebagai aset berharga.

Mana pula klaim bahwa kebhinekaan budaya merupakan aset bangsa? Selain paket-paket kultural untuk konsumsi pariwisata, tidak tampak adanya pengolahan secara kreatif untuk menjadikan modal kultural itu sebagai driving force bagi kemajuan dan kemandirian bangsa.

Tidakkah ini semua menggugah kesadaran kita? Di satu sisi, kita patut bersyukur bahwa Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya kultural yang sangat berlimpah. Namun di sisi lain, kita melihat betapa kinerja kebudayaan kita untuk memuliakannya masih sangat miskin.

Jika kata “kebudayaan” disepadankan dengan istilah “culture”, yang secara etimologis berarti “mengolah tanah”, akan semakin terbuka jendela kesadaran kita, bahwa kemiskinan yang menyelimuti kehidupan kita itu justru disebabkan oleh kemiskinan kreativitas kultural itu sendiri, yakni lemahnya daya-daya saintifik dan etos kerja untuk mengaktualisasikan potensi-potensi sumberdaya yang berlimpah itu.

Dalam konteks inilah kita memandang bahwa adopsi dan pengembangan teknologi di Indonesia, bukan saja sesuatu yang perlu melainkan juga imperatif. Teknologi telah menjadi ciri pendefinisi masyarakat masa kini. Suka atau tidak, keberadaannya telah menjadi begitu sentral dalam mempengaruhi cara hidup dan kehidupan kita. Masalahnya adalah, teknologi macam apa, bagaimana hal itu dikembangkan, untuk apa dan untuk siapa? Tulisan ini akan mencoba memberikan argumen tentang pentingnya basis humaniora (sosio-kultural) bagi perwujudan karakter-kemajuan.

Agenda Pembangunan dan Jebakan Slogan

Sebagai respon terhadap

kondisi objektif dan tantangan yang menghadang, akhir-akhir ini wacana pembangunan disibukkan dengan tiga kata kunci, industri, teknologi, dan sumberdaya manusia (SDM). Arus balik perhatian orang terhadap masalah ini amat melegakan, namun sekaligus bukan tanpa bahaya. Ketiga istilah itu lebih sering digunakan sebagai slogan ketimbang dipahami, sebagai fashion ketimbang praktis, dan sebagai jargon politik ketimbang cetak-biru untuk bertindak.

Bahwa kita sering latah dengan istilah-istilah “besar” yang tidak kita pahami benar medan maknanya, adalah kebiasaan buruk yang memperdayakan. Sementara kita sibuk mempersiapkan kurikulum pendidikan yang link and match dengan tantangan industrialisasi, pengertian industrialisasi itu sendiri masih samar-samar kita pahami makna dan cakrawalanya. Yang sering tersimpul dari aneka wacana di sekitar kita, terkesan bahwa industrialisasi itu sebangun dengan fungsi masukan dan perkembangan teknologi.

Dalam definisi seperti itu, tantangan industrialisasi dinisbatkan menjadi sekadar bagaimana cara memperoleh dan mengembangkan teknologi yang terintegrasi ke dalam proses-proses produksi. Dan dengan demikian, pendidikan berorientasi industri berarti pendidikan yang sanggup memasok “suku cadang” siap pakai (siap latih) bagi perputaran roda mesin dan laju produksi.

Dengan reduksionisme serupa itu, industrialisasi diperlakukan sebagai jagat mesin yang tidak terintegrasi ke dalam kerangka formasi institusional dan proses-proses sistem kemasyarakatan. Padahal, seperti ditunjukkan sejarah Eropa Barat dan Amerika Serikat, proses industrialisasi dan pembentukan masyarakat industri selalu berjalan berkelindan. Bahkan menurut Jurgen Habermas (1990), terdapat hubungan yang signifikan antara formasi kerangka institusional dan bentuk integrasi sosial baru dengan laju perkembangan teknologi dan

produksi, dimana perkembangan yang terakhir justru terjadi kemudian setelah adanya reformasi “sosial budaya”.

Kalaupun sejarah Eropa Barat dan AS ini tidak persis sama dengan Indonesia, setidaknya-tidaknya ada hal yang bisa disimpulkan, bahwa selain gejala teknologis, industrialisasi pun harus dipandang sebagai gejala sosio-kultural. Dan sebagai gejala terakhir ini, transformasi masyarakat menuju industrialisasi biasanya mensyaratkan adanya perubahan-perubahan mendasar dalam kultur dan struktur kemasyarakatan, seperti ditandai oleh: (a) terjadinya pembagian kerja (division of labour) dalam proses produksi; (b) proses rasionalisasi kultural dan wawasan yang serba berperhitungan, terutama yang menyangkut etos kerja; (c) diterapkannya sistem mekanisme dalam proses produksi; (d) aplikasi cara pemecahan masalah secara universal dan ilmiah; (e) penerapan disiplin waktu dalam bekerja dan cara pengupahan dengan tarif bertingkat-tingkat guna memberi rangsangan kerja; (f) birokrasi dan administrasi yang rasional dan menurut aturan-aturan tertentu; (g) adanya tenaga kerja yang mudah berpindah (mobile) secara sosial maupun geografis; serta (h) tumbuhnya semangat berproduksi itu sendiri (Schneider, 1986; Rahardjo, 1995).

Dengan memperhitungkan konteks sosial-budaya dari proses industrialisasi, menjadi jelas bahwa transformasi menuju masyarakat industri tidak hanya mensyaratkan adanya perubahan-perubahan sistem reproduksi material, yang berintikan penguasaan dan pemanfaatan aspek-aspek keteknikan, tetapi juga perubahan-perubahan sistem reproduksi ideasional dan tata nilai yang mengusungnya. Itu juga berarti bahwa visi pendidikan yang berorientasi industri tidak hanya dituntut untuk mengembangkan keahlian (keterampilan), tetapi juga ditantang untuk dapat mengembangkan sikap-kejiwaan yang menopang daya cipta, etos

kerja, kreativitas inovatif, disiplin, keteraturan, dan perencanaan.

Dikatakan dengan cara lain, bahkan ketika misi pendidikan disusutkan menjadi sekadar penyokong proses industrialisasi sekalipun, pengajaran dan wawasan sosial-budaya menjadi tak bisa diremehkan. Apalagi jika kita memperhitungkan apa yang pernah diingatkan Soedjatmoko (1987), bahwa hampir semua keputusan pembangunan (apalagi pilihan industrialisasi) akan mempunyai akibat-akibat etis dan kemanusiaan, yang dalam jangka panjang akan sangat menentukan. Sehingga kesadaran akan arah moral, serta kemampuan untuk mengharmonikan aspek-aspek technosphere dan sociosphere, menjadi kunci penentu kinerja pembangunan masa depan.

Miskonsepsi tentang Teknologi

Barangkali masih bisa dimaklumi jika orang mendefinisikan industrialisasi semata-mata sebagai fungsi masukan dan perkembangan teknologi. Tetapi, masalahnya, pemahaman terhadap istilah teknologi itu sendiri seringkali sama reduksionistiknya seperti istilah industrialisasi. Teknologi acapkali diidentikkan sebagai “alat” (tools). Dengan memandang teknologi melulu sebagai alat (mesin), konsentrasi pengembangan SDM berwawasan teknologi dan industri kemudian ditekankan secara berlebihan kepada bidang-bidang keteknikan.

Padahal, seperti dikatakan oleh Johan Galtung: Adalah naif memandang teknologi sebatas persoalan hardware, keterampilan, dan software belaka. Komponen-komponen ini memang penting, tetapi hanya sekadar tampilan permukaan, seperti penampakan puncak gunung es. Teknologi juga menyangkut struktur terkait, bahkan struktur terdalam, kerangka mental, kosmologi sosial, yang berperan sebagai ladang subur dimana benih-benih pengetahuan tertentu bisa tertanam, tumbuh dan

membangkitkan pengetahuan baru. Dan agar suatu alat bisa dioperasikan secara baik, struktur perilaku tertentu dibutuhkan. Alat-alat tidaklah beroperasi di ruang vakum; mereka adalah man-made dan man-used yang memerlukan pengelolaan sosial tertentu agar bisa dioperasikan (dalam Tehranian, h. 6).

Ditambahkan oleh Norman J. Vig (1988, h. 10), bahwa tersebar-luasnya adopsi teknologi lebih mendorong perluasan definisi dan konseptualisasinya. Teknologi tidak bisa lagi didefinisikan hanya sebatas stok kumulatif dari alat, mesin, dan pelbagai artifak lainnya (“technic” dari peradaban modern), tetapi bisa juga diartikan sebagai cara tertentu untuk mengetahui dan mengerjakan sesuatu. Dengan begitu, teknologi lebih dari sekadar pengetahuan terapan atau rekayasa seperti dalam pemahaman dunia akademik tradisional. Melainkan dapat dipandang sebagai pendekatan universalistik dalam pemecahan masalah (“technique”), dan menurut sebagian teoris, ia juga berarti suatu imperatif yang berhubungan dengan organisasi rasional dari perilaku sosial.”

Lebih lanjut, Edward Wenk, Jr. (1986, h. 7) menegaskan bahwa teknologi merupakan sistem sosial yang didorong oleh spesialisasi pengetahuan dan melibatkan seluruh institusi sosial berikut jalinan komunikasinya. “Sebagai proses sosial, teknologi berhubungan dengan masyarakat, nilai, pilihan politik dan keterkaitan di antara ketiga unsur tersebut.”

Seperti mengkristalisasi pandangan-pandangan di atas, The Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT) merumuskan setidaknya-tidaknya ada empat komponen teknologi; technoware (unsur perangkat keras), infoware (unsur informasi), humanware (unsur sumberdaya manusia) dan organware (unsur manajemen dan lingkungan sosial). Keempat komponen ini mesti berjalan berkelindan; yang satu melengkapi yang lain, membangun ruang jajaran genjang yang seimbang.

Sehingga yang dimaksud dengan temuan-temuan inovatif dalam pengembangan teknologi, tidak hanya sebatas sukses-sukses temuan baru keteknikan, tetapi harus didukung oleh kehandalan aspek-aspek lainnya, sehingga sanggup membawa temuan-temuan tersebut kepada kesempatan pasar dan penerimaan sosial dengan daya saing dan daya akseptabilitas yang tinggi.

Jika definisi APCTT dijadikan pedoman, akan tampak bahwa upaya pengembangan teknologi tidak bisa hanya bertumpu pada bidang studi keteknikan. Sebab bidang ini hanya memenuhi sebagian pilar yang diperlukan, terutama yang berkaitan dengan penyediaan sumberdaya manusia terampil untuk penguasaan technoware, dan aspek-aspek tertentu dari infoware. Sementara tuntutan lainnya yang berkenaan dengan aspek-aspek sikap-kejiwaan dari sumberdaya manusia, pengolahan informasi serta kemampuan manajemen dan penciptaan kondisi sosial yang kondusif, lebih cenderung berada di domain ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Dengan kata lain, penguasaan teknologi tidak hanya memerlukan pendidikan techno-engineering, tetapi juga socio-engineering.

Miskonsepsi tentang Pengembangan SDM

Ditinjau dari perspektif ketenagakerjaan, industrialisasi itu tak lain merupakan fungsi dari diferensiasi kerja dalam proses produksi. Adapun diferensiasi itu sendiri didasarkan pada kebutuhan dan keahlian pekerja pada bidangnya masing-masing, yang secara sinergis mendukung total kinerja industrial.

Itu berarti, esensi sesungguhnya dari konsep pendidikan “siap pakai” tak lain adalah upaya revitalisasi lembaga-lembaga pendidikan sebagai ajang pendalaman dan aktualisasi aneka bakat dan minat anak didik hingga mencapai taraf dalam bidang dan predisposisinya masing-masing. Sehingga pada gilirannya, mampu memasok pelbagai kebutuhan dan

tantangan industrial.

Dengan demikian, mestinya, tidak ada perbedaan yang mendasar antara konsep pendidikan link and match dengan konsep holistic education. Dalam konsep yang terakhir ini, manusia dipandang sebagai makhluk yang dikaruniai potensi intelegensia yang beraneka; dan oleh karena itu, tugas pendidikan adalah memfasilitasi dorongan individu untuk mengaktualisasikan potensinya masing-masing.

Dengan berpegang pada teori “multiple intelligences”-nya Howard Gardner (1983), setidaknya-tidaknya ada tujuh jenis intelegensia yang semuanya jarang dimiliki dalam diri seorang: (1) logical-mathematical intelligence; (2) linguistic intelligence; (3) musical intelligence; (4) bodily-kinesthetic intelligence; (5) spatial intelligence; (6) personal intelligence (to understand ourselves); dan (7) social intelligence.

Dari ketujuh jenis intelegensia itu, yang kita muliakan sebagai ukuran kualitas sumberdaya manusia selama ini lebih sering tertuju hanya pada logical-mathematical intelligence. Padahal kesemuanya itu adalah daya-daya insaniah yang punya tempat dan kontribusinya sendiri-sendiri dalam kehidupan, dan bahkan dalam struktur industrialisasi.

Pengutamaan secara berlebihan terhadap jenis intelegensia ini, biasanya dilandaskan pada argumen-argumen pragmatisme: bahwa tumpuan daya saing dan kesempatan kerja di masa depan sangat mengandalkan penguasaan teknologi. Di sini, teknologi lagi-lagi disalahartikan. Ada kesan bahwa yang diperlukan dalam proses ini adalah logika matematika dan keterampilan teknis semata. Proses pendidikan kemudian disusutkan menjadi sekadar persoalan kejuruan. Pengolahan daya intelektual disusutkan, pembudayaan sikap kritis ditumpulkan.

Obsesi keterpakaian ini memang tidak salah. Bahkan kampus-kampus di Amerika, lantaran terimbas oleh resesi ekonomi dan inflasi

yang membubung sejak era 70-an, tersihir juga oleh godaan ke arah apa yang disebut dengan “the New Vocationalism”. Tetapi respon Amerika terhadap tantangan ini sungguh berbeda secara diametral dengan apa yang muncul di sini. Dalam kesadaran para pendukung vokasionalisme baru di Amerika, hal yang paling krusial untuk segera ditangani dalam kaitannya dengan desakan pragmatisme ini justru perlunya perluasan pengajaran budaya menulis (writing) dan mengarang (composition). Kendati tujuan pengajaran literasi dalam konteks ini lebih berorientasi vokasional, tetapi ada argumen mereka yang perlu kita renungkan: “Krisis budaya literasi pada gilirannya akan memperlemah daya saing Amerika” (Wlad Godzich, 1994).

Bagi mereka, basis utama daya saing itu tidak terletak pada keterampilan teknis semata, tetapi justru pada upaya revitalisasi sistem reproduksi ideasional. Tilikan ke arah ini adalah rasional. Bukankah telah sering disebutkan, bahwa revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa perubahan yang radikal dalam kinerja dunia kerja. Makin eratnya kaitan antara hasil-hasil litbang iptek dengan kegiatan sektor produksi, dan juga kian padatnya kandungan pengetahuan dan teknologi di sektor produksi itu sendiri, akan membawa perubahan yang signifikan dalam postur perusahaan dan struktur ketenagakerjaan.

Yang akan terjadi adalah proses transformasi dari tekanan pada “volume tinggi” (high volume) menuju “nilai tinggi” (high value). Dalam posturnya yang terakhir ini, perusahaan tidak lagi mengandalkan keuntungan pada skala dan volume, melainkan pada penemuan secara berkesinambungan dalam rantai hubungan antara pemecahan dan kebutuhan. Tantangannya di sini bukan lagi masalah volume atau harga, namun pada keterampilan dalam menemukan padanan yang tepat antara teknologi tertentu

dengan pasar tertentu. Sehingga fokus utama dari perusahaan ini tidak lagi pada produk semata, tetapi lebih berpusat pada spesialisasi pengetahuan.

Kualifikasi sumberdaya manusia yang memenuhi tantangan ini bukan berbasis pada kemampuan teknis, melainkan pada kemampuan beradaptasi secara berkesinambungan dengan proses-proses pemecahan masalah, dan dalam aktivitas layanan strategis. Tenaga-tenaga handal dalam bidang ini sangat dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas penelitian secara terus-menerus, guna menemukan model aplikasi baru, kombinasi baru, dan peningkatan kemampuan untuk memecahkan aneka problema yang muncul (Reich, 1992).

Pembacaan tersebut disertai pemahaman mengenai trend perkembangan teknologi yang makin memperpendek siklus produk dan jarak antarnegara. Sebab perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi memberi kita suatu wawasan, bahwa yang paling kita butuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan bukanlah pabrik “batu bata”, tetapi justru proses penempatan “tanah liat”; bukan manusia teknis siap-pakai, melainkan manusia yang berdaya adaptasi tinggi, punya visi ke depan dan memiliki semacam asketisme dalam kerja.

Perlunya Strategi Kebudayaan

Tetapi, walaupun pada saat ini kita merasa terdapat bantalan kebudayaan yang kurang kondusif ke arah perkembangan iptek, itu tidak berarti bahwa tidak ada jalan ke arah revitalisasi. Sebab kebudayaan sendiri adalah suatu proses belajar. Ia mesti bersifat dinamis dan terbuka (Peursen, 1976; Noerhadi, 1994). Terlebih lagi, ketika teknologi komunikasi memungkinkan terjadinya peningkatan relasi inter-kultural yang semakin intensif dan ekstensif, dan tanpa dibatasi oleh hambatan-hambatan ruang dan waktu, maka horizon belajar itu semakin luas. Sehingga

memungkinkan kita untuk meramu komposisi-komposisi kebudayaan umat manusia.

Upaya revitalisasi serupa itu bukan belum pernah dilakukan. Kuntowijoyo (1994), misalnya, memberi contoh adanya gerakan pembaruan budaya pada awal abad ke-20, yang dipelopori oleh kaum priyayi berpendidikan Belanda. Di tengah-tengah kebudayaan lama dan politik kebudayaan kolonial, kalangan ini mengumandangkan gerakan kemajuan, menganjurkan kebudayaan berpikir ilmiah, mengganti interpretasi-interpretasi magis dengan penjelasan yang rasional. Penjelasan lama tentang gerhana bulan, misalnya, diruntuhkan oleh argumen-argumen ilmiah.

Sementara, semangat modernisme Islam seperti ditunjukkan oleh Muhammadiyah, juga secara menggelora memaklumkan “perang” terhadap bid’ah dan khurafat. Cita-cita kemajuan dan kebudayaan rasional, kemudian tumbuh menjadi kebudayaan kritis. Di sinilah tata cara masyarakat organistik, terencana dan de-mokratis, telah dirintis. Sesuatu yang telah memberi andil besar dalam membentuk gugus baru masyarakat yang menjadi bantalan vital dalam merebut kemerdekaan Indonesia.

Sayangnya, evolusi kebudayaan tidak selalu berjalan lurus dan bersambung. Munculnya trauma-trauma politik di penghujung Orde Lama, telah melahirkan “bayi traumatik” Orde Baru dengan mekanisme defensifnya berupa negara yang kuat, birokratisasi yang eksekutif, dan meluasnya depolitisasi. Ini semua harus dibayar dengan melemahnya civic culture, mengendurkan social learning, dan melambatnya kreativitas berpikir.

Konsekuensi lebih lanjut dari semua itu adalah munculnya apa yang disebut Ogburn dengan “cultural lag”, yakni tercecernya gerak perkembangan sistem budaya (non-material) dari dinamika pembangunan material (dalam Nagai, 1993, h. 259-260). Yang berlangsung kemudian adalah suatu

perkembangan industrialisasi dan adopsi teknologi, tanpa didukung oleh sistem budaya industrial dan saintifik.

Kita dapati di sini, sementara industrialisasi yang sehat perlu didukung iklim budaya yang berorientasi pada prestasi (merit), yang berkembang justru masih dominannya pertimbangan-pertimbangan askriptif (nepotisme). Sementara industrialisasi dan promosi teknologi hanya bisa tumbuh secara baik dalam situasi budaya yang memacu kompetisi, yang berjaya di sini justru praktik-praktik monopolistik dan kolusif. Sementara perkembangan ilmu yang subur perlu dilandasi semangat kolejial, sikap kritis, dan dialog-dialog inter-kultural, yang dipupuk di sini justru sikap-sikap feodal, anti-kritik, dan kecenderungan nepotis.

Mempertimbangkan hal itu, sudah saatnya kita menyadari bahwa pengembangan teknologi, baik untuk alasan kemakmuran ataupun demi mencegah dampak negatifnya, tidak bisa ditundukkan hanya pada prinsip-prinsip keteknikan atau rasio instrumental semata, tetapi sudah seharusnya ditarik ke jangkar sosio-kultural tempat dialog-dialog konsensual dilakukan. Teknologi terlalu berharga untuk diserahkan hanya pada segelintir elite politik, komersial, dan keilmuan. Untuk itu, sudah seharusnya kita semua melibatkan diri di dalamnya. Seseorang tidak perlu berlatar sains dan teknologi untuk mengenali betapa sentralnya peranan teknologi dalam kehidupan kita.

Jelaslah di sini bahwa, yang diperlukan sekarang adalah suatu komitmen semua pihak untuk melakukan revitalisasi kebudayaan yang sesuai dengan tuntutan penguasaan iptek. Itu berarti, kebudayaan sebagai proses belajar perlu ditransformasikan dari suatu model budaya ke model yang lain, dengan pendekatan tertentu yang dilakukan secara sadar dan terencana. Dengan kata lain, manusia Indonesia perlu dijadikan sadar akan

kebudayaan, dan ini berarti bahwa ia secara aktif harus turut memikirkan dan merencanakan arah yang akan ditempuh oleh kebudayaan, dalam rangka mendorong perkembangan iptek. Singkatnya, yang kita perlukan sekarang adalah suatu strategi kebudayaan.

Untuk merencanakan suatu strategi yang adekuat, kita agaknya perlu mempertimbangkan beberapa hal penting. Pertama, strategi kebudayaan dimaksudkan untuk menghadapi masa depan dengan segala masalah dan tantangannya. Karena itu, ia harus berorientasi ke depan. Warisan budaya perlu dihargai. Tetapi, agar warisan tersebut dapat menunjukkan maknanya bagi kehidupan masyarakat kontemporer, maka perlu dibuat tafsiran-tafsiran kreatif, beserta kemungkinan penyempurnaannya lewat proses belajar inter-kultural.

Kedua, strategi kebudayaan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, upaya pembangunan iptek sebagai fenomena kerja kebudayaan, secara kualitatif harus mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani dan rohaninya secara adil dan merata.

Ketiga, seperti dikatakan Soerjanto Poespowardjo (1993), penyusunan suatu strategi perlu dibuat dengan persepsi budaya yang komprehensif, yang mempunyai cakupan yang luas atas perikehidupan masyarakat Indonesia. Cakupan yang luas itu secara ringkas menyangkut semua faktor budaya yang terdiri atas manusia (*anthropos*), lingkungan (*oikos*), alat (*tekne*) dan komunitas (*ethnos*).

Anthropos adalah manusia secara individual sebagai faktor sentral dari kerja kebudayaan. Ia bukan saja sebagai pendukung dan pencipta iptek. Karena itu, aspek-aspek kognitif, efektif, dan konatifnya perlu dipupuk dan dikembangkan lewat suatu strategi pendidikan dan pembudayaan yang sesuai dengan

tuntutan zamannya.

Oikos adalah *universum kosmis*, suatu lingkungan hidup di mana manusia menjalankan proses pembudayaannya. Lingkungan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana bagi kelangsungan hidupnya, melainkan juga sebagai medan yang memungkinkannya berjuang untuk hidup melalui karya-karyanya. Karena itu, dalam segala upaya pengembangan iptek, penting untuk memperhatikan keselarasan hubungan serta menjaga kelestariannya.

Tekne adalah peralatan yang digunakan untuk mengerjakan dunia iptek. Tetapi lebih dari sekadar alat, dalam perkembangan selanjutnya tekne juga mengandung muatan-muatan nilai dan sikap tersendiri. Harus dijaga agar pengembangannya tidak mendegenerasikan martabat manusia hanya menjadi sekumpulan dari suatu tekno-struktur. Karena itu, pemahaman terhadap nilai-nilai etis dan estetis sebagai bingkai dari pengembangan iptek, perlu dipertimbangkan secara seksama.

Sementara *ethnos*, yang berarti komunitas, menunjukkan bahwa upaya pengembangan iptek sebagai salah satu kerja budaya merupakan hasil interaksi antarpribadi yang tergabung dalam masyarakat. Setiap intuisi, interpretasi, dan karya individu yang bagaimanapun juga unik dan orisinalnya, akan hilang lenyap kalau tidak ditampung dalam dukungan kolektivitas, diartikulasikan dalam keterjaminan yang organis, serta dibudayakan sebagai warisan dan komitmen bersama. Itu berarti, upaya-upaya pengembangan iptek mesti mendapatkan iklim sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan informasi yang kondusif, sejalan dengan dinamika yang ada.

Semua variabel dari strategi kebudayaan itu perlu diperhatikan agar bangsa Indonesia bisa mereguk dua hal sekaligus: daya-dukung budaya bagi pengembangan iptek, dan pendedikasian iptek itu sendiri bagi pengembangan budaya dan peningkatan kesejahteraan rakyat. ◻

2015

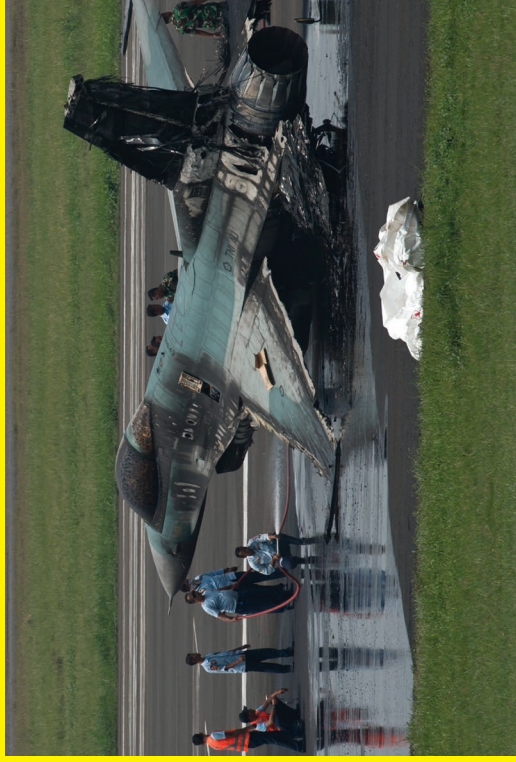
DALAM LENSE AKTUAL

1/ EKOR PESAWAT BERTASIL DIANGKAT. Kapal Crest Onyx mengangkat ekor pesawat Air Asia QZ8501 di perairan Laut Jawa, Sabtu (10/1). Tim SAR gabungan berhasil mengangkat ekor pesawat Air Asia QZ8501. (ANTARA FOTO/Praseyo Utomo)

2/ F-16 GAGAL TERBANG. Petugas menyiramkan cairan ke badan pesawat tempur F16 yang terbakar di ujung landasan pacu Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (16/4). Pesawat tempur TS F16 dengan nomor register TS 1643 yang dipiloti oleh Letkol Pnb Firman Dwi Cahyono tersebut gagal tinggal landas (takeoff) dan terbakar sekitar pukul 08.15 WIB. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

3/ ETNIS ROHINGYA DI ACEH. Foto kolase warna etnis Rohingya yang sedang didata petugas Indonesian Automatic Fingerprints Identification System (INAFIS) Polda Aceh di tempat penampungan sementara Kuala Langsa, Aceh, Senin (18/5). Sedikitnya ada 370 etnis Rohingya asal Myanmar yang 420 pengungsi Bangladesh yang terdampar di perairan pantai Langsa dan kini berada di penampungan sementara Kuala Langsa, Aceh. (ANTARA FOTO/Rony Muharman)

4 EMAS TRIYANINGSIH. Pelari Indonesia Triyaningsih membawa bendera merah putih usai memasuki garis finish setelah menyelesaikan putaran nomor Lari 10 ribu meter putri Sea Games ke-28 di National Stadium, Singapura, Kamis (11/6). Triyaningsih menjadi yang tercepat dan berhak mendapat medali emas dengan catatan waktu 33 menit 44,53 detik. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)



5/ PESAWAT HERCULES C-130 JATUH. Petugas gabungan berada di dekat puing pesawat Hercules C-130 yang jatuh di Jalan Jatin Ginting, Medan, Sumatera Utara, Selasa (30/6). Sedikitnya 30 korban tewas dalam peristiwa tersebut. (ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi)

6/ PUNCAK ARUS MUDIK
Kendaraan pemudik terjebak macet di jalan tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (15/7). Pada puncak arus mudik H-2 Lebaran, ribuan kendaraan terjebak macet hingga 38 KM antara jalan tol Cipali hingga tol Palikanci. (ANTARA FOTO/Sigrid Kurniawan)

7/ GEMPA TEKTONIK GUNUNG RAUNG. Warga melihat erupsi Gunung Raung di Desa Sumber Arum, Songon, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (25/7). Pengamatan yang dilakukan PVMBG di pos pengamatan, terjadi satu kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 32 sampai 47 Lg 229. (ANTARA FOTO/Budi Candra Setya)

8/ PRESIDEN TINJAU KEBAKARAN LAHAN. Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri) meninjau lokasi kebakaran lahan di Desa Pulo Keranggan, Kec Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir, Sumsel, Minggu (6/9). Presiden meminta Kapolri untuk menindak tegas pelaku dan perusahaan yang membakar lahan dengan sengaja. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

9/ EVAKUASI JENAZAH TRIGANA DI BANDARA OKSIBIL. Petugas SAR gabungan memasukkan jenazah korban kecelakaan pesawat Trigana Air ke dalam pesawat untuk selanjutnya diberangkatkan menuju Bandara Sentani di Bandara Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Rabu (19/8). Sebanyak empat jenazah korban kecelakaan pesawat Trigana Air telah dibawa ke Bandara Sentani, Jayapura. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

10/ SETYA NOVANTO HADIRI RAPAT PARIPURNA. Mantan Ketua DPR Setya Novanto (tengah) melambatkan tangannya bersama anggota DPR lainnya setelah saat mengikuti Rapat Paripurna ke-15 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/12). Setelah resmi mudur dari jabatannya sebagai Ketua DPR, Setya Novanto mengikuti rapat paripurna sebagai anggota DPR. (ANTARA FOTO/Haidiz Mubarak)



Musibah Jatuhnya Pesawat T-50i TNI AU

Dunia kedingantaraan dan kemiliteran Indonesia kembali berduka. Hal ini terasa sesudah kecelakaan jatuhnya pesawat latih tempur T-50i Golden Eagle TNI AU, saat melakukan atraksi terbang pada acara Jogja Air Show, Minggu 20 Desember 2015. Dua pilotnya tewas, yakni Letkol Penerbang Marda Sarjono dan Kapten Penerbang Dwi Cahyadi.

Letkol Penerbang Marda Sarjono adalah juga Komandan Skadron Udara Tempur 15 yang bermarkas di Pangkalan Udara Iswahjudi, Madiun, Jawa Timur. Ia menjabat Danskadron Udara 15 sejak 23 Oktober 2014. Ini adalah skadron yang khusus mengoperasikan pesawat T-50i, hasil pengembangan industri penerbangan Korea Selatan bersama perusahaan AS Lockheed Martin.

Pesawat T-50i itu jatuh saat melakukan atraksi dan manuver di langit Yogyakarta. Mesin pesawat itu, menurut saksi mata, mendadak mati dan kehilangan tenaga. Pesawat dengan cepat menghujam ke tanah. Kedua pilot tidak sempat meloncat ke luar dengan ejection seat (kursi pelontar). Padahal ini adalah salah satu pesawat yang canggih dan belum lama dimiliki TNI AU.

Pesawat ini sudah dikembangkan sejak 1990, dan mulai diproduksi massal oleh Korea Selatan pada 2003. Di Indonesia, T-50i sudah didatangkan sejak akhir 2013 untuk menggantikan pesawat latih jet Hawk MK-53. Total ada 16 pesawat yang dipesan Kementerian Pertahanan dan datang secara bertahap.

T-50i termasuk salah satu pesawat latih tempur canggih. Bobotnya yang ringan dan mesin yang kuat, membuat pesawat ini cocok dijadikan pesawat latih lanjutan bagi pilot pesawat tempur. Pesawat ini memiliki panjang 13 meter dan lebar 9,45 meter, dengan kecepatan maksimum mencapai 1.600 km/jam atau 1,4 Mach. T-50i memiliki persenjataan cukup lengkap. Ada gattling gun tiga laras yang bisa menyemburkan 2.000 peluru setiap menitnya, serta beragam rudal dan roket.

Dengan segala kecanggihannya, toh kecelakaan bisa terjadi. Penyebab jatuhnya pesawat belum diketahui. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan penyelidikan tuntas atas kecelakaan ini. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AU Dwi Badarmanto, pesawat T-50 yang dipakai itu sudah punya jam terbang tinggi dan kerap melakukan manuver di berbagai acara TNI. Dua pilotnya juga sudah berpengalaman. Sebelum terbang, pesawat juga sudah diperiksa secara cermat.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanudin,



Seorang pengunjung melambatkan tangan saat menyaksikan atraksi manuver yang dilakukan dua orang awak pesawat tempur T50 sesaat sebelum pesawat tersebut jatuh pada Gebyar Dirgantara AAU di Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, Minggu (20/12).

menyatakan, “Saya minta TNI bekerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan investigasi.”

Purnawirawan Jenderal TNI dan politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, T-50 adalah pesawat baru, yang dibeli untuk kepentingan latihan dan operasi militer. Atas dasar ini perlu dilakukan investigasi menyeluruh.

Banyak faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan, apakah human eror, pesawat itu sendiri atau faktor lingkungan. Ini harus jelas, kata Hasanudin. Ia meminta jajaran TNI AU, terutama para penerbang, untuk tetap bersemangat mesti ada peristiwa jatuhnya pesawat T-50 ini. “Para penerbang TNI harus senantiasa menjaga kedaulatan udara negara kita,” tegas Hasanudin.

Kita patut prihatin, karena kecelakaan pesawat terbang milik TNI AU –baik yang memakan korban tewas atau tidak—tetap suatu kerugian yang besar. Hal ini karena harga alat utama sistem persenjataan (alutsista) itu tidak murah, sementara jumlah alutsista itu sendiri masih belum memadai. Indonesia harus menjaga ruang udara dan kawasan laut yang sangat luas, dan itu membutuhkan banyak pesawat tempur dan kapal perang.

Di sisi lain, ada tantangan dan potensi ancaman yang cukup besar. Potensi konflik militer di Laut China Selatan, akibat tumpang tindih klaim wilayah antara China melawan negara-negara sekitar –termasuk sejumlah anggota ASEAN—membuat Indonesia harus bersiaga. Indonesia memang tidak punya klaim di Laut China Selatan, tetapi Pulau Natuna milik RI berhadapan langsung dengan Laut China Selatan.

Jatuhnya pesawat TNI AU selama ini sering dikaitkan dengan pernyataan bahwa alutsista itu sudah usang atau terlalu tua. Sehingga “wajar” jika jatuh, karena masa pakainya sudah kadaluwarsa. Namun, untuk pesawat T-50i pernyataan itu tidak akurat, karena pesawat ini belum lama bergabung dengan TNI AU. Ini juga pesawat yang dibeli dalam keadaan baru, bukan pesawat bekas pakai.

Oleh karena itu, perlu diperiksa secara mendalam dan mungkin juga perlu dievaluasi, bagaimana proses pengadaan alutsista, manajemen pengelolaan dan operasionalnya. Kita tidak ingin musibah kecelakaan seperti ini berulang lagi.

Untuk jangka panjang, pemerintah dan DPR tetap berkomitmen untuk membantu TNI, dalam melakukan peremajaan dan menambah kekurangan alat utama sistem senjata. Ini tidak bisa ditawar-tawar demi kedaulatan Indonesia. Namun di sisi lain, pihak pengguna –yakni, TNI— dan Kementerian Pertahanan harus terus menyempurnakan proses pengadaan alutsista, manajemen pengelolaan dan operasionalnya. Hal ini penting agar alutsista yang sudah ada dapat dipergunakan seefisien dan seefektif mungkin, dalam menjaga wilayah kedaulatan NKRI. ◦



Pertama dalam Sejarah, PT PAL Bakal Ekspor Kapal Perang

PT PAL Indonesia segera meluncurkan satu unit kapal perang pesanan Filipina jenis “Strategic Sealift Vessel” (SSV), yang proses pengerjaannya sudah mencapai 90 persen, pada 18 Januari 2016.

Peluncuran tersebut rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo, sebab menjadi catatan sejarah Indonesia yang kali pertama melakukan ekspor kapal jenis perang.

“Kita masih menunggu konfirmasi dari beliau (presiden), sebab peluncuran atau ‘launching’ ini sekaligus menjadi bagian dari uji coba pertama bagi kapal perang buatan anak bangsa,” ujar Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Edy Widarto, di Surabaya, Selasa (29/12).

Dalam peluncuran nanti, kapal perang canggih itu akan diuji coba untuk mengapung di laut, serta kekuatan daya tahan kapal terhadap musuh, ditambah fungsi sejumlah peralatan canggih yang ada di dalam manifest kapal.

“Setelah peluncuran, kemudian kita sempurnakan dengan melakukan pengujian sesuai pesanan dan menyambung lagi beberapa

komponen peralatan listrik,” ucapnya.

Dengan begitu, kata Edy, satu unit kapal tersebut akan siap diserahkan secara resmi kepada pemerintah Filipina pada Mei 2016.

Dalam peluncuran itu, Edy mengatakan juga akan dilakukan beberapa agenda besar, seperti peluncuran kapal jenis Perusak Kawal Rudal (PKR) pesanan TNI Angkatan Laut, serta peletakan blok kapal perang kedua pesanan Filipina.

“Filipina memesan dua unit kapal perang ‘Landing Platform Deck’ (LPD) jenis SSV kepada Indonesia. Pada saat peluncuran, kapal pertama kita lakukan peletakan blok untuk pesanan tahap kedua,” katanya.

Sebelumnya, kapal pesanan Filipina itu didesain dengan panjang 123 meter, lebar 21,8 meter dan mampu mengangkut 500 pasukan serta bobot hingga 10.300 ton, serta mempunyai kecepatan atau dapat melaju selama 30 hari dengan jarak 9.360 mil laut dengan kecepatan maksimal 16 knot.

Selain itu, kapal perang buatan anak negeri tersebut juga mampu membawa dua helikopter, dan mengangkut kapal “landing craft utility” (LCU) serta sejumlah tank perang hingga truk militer. /Ismed-Ant

YLKI: Pemerintah Liberalisasi Tarif Listrik PLN

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, skema *tariff adjustment* menghilangkan peran pemerintah dalam hak publik untuk mendapatkan listrik. Alasan kenaikan listrik karena adanya inflasi hanya alibi belaka.

“Semua orang tahu dampak kenaikan listrik menimbulkan inflasi. Namun tarif listrik dinaikkan karena inflasi hanya menjadikan alibi yang aneh untuk membayar hutang PLN yang besar. Kebijakan ini tidak tepat dan tidak adil,” kata Tulus Abadi dalam diskusi di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (29/12).

Lebih lanjut Tulus mengatakan, ada tiga indikator kebijakan tarif listrik, harga minyak dunia, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi semakin membuktikan pemerintah tidak hadir dalam memberikan hak listrik dan perlindungan terhadap masyarakat.

Tulus menilai, tiga variabel tersebut merupakan pola pasar bebas dan pemerintah telah menyerahkan kebutuhan listrik masyarakat kepada mekanisme pasar.

“Katanya dengan kebijakan *adjustment* negara hadir untuk masyarakat, namun kenaikan dengan skema ini membuktikan negara tidak hadir karena indikatornya dilepaskan pada pasar,” tutur Tulus.

Selain itu, secara psikologi *tariff adjustment* melukai masyarakat yang saat ini sedang menghadapi ketimpangan ekonomi.

“Kondisi saat ini banyak daerah yang sering mengalami pemadaman, namun pemerintah menjawab dengan kenaikan tarif,” pungkasnya. /Ismed





Sutiyoso: Penyelesaian Kelompok Din Minimi Jadi Model

Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Sutiyoso, mengatakan penyelesaian terhadap kelompok bersenjata di Aceh Din Minimi, dapat dijadikan model penyelesaian kelompok bersenjata lainnya, karena dilakukan dengan “soft approach”.

Dalam keterangan persnya, Selasa (29/12), Sutiyoso mengatakan, dalam

penyelesaian kelompok bersenjata, pihaknya langsung menuju lokasi Din Minimi dan membawanya turun serta kembali ke rumah orang tuanya di Desa Ladang Baro, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur.

Sebelumnya Sutiyoso juga mengaku sudah menjalin kontak dengan Nurdin Ismail alias Din

Minimi, sekitar 2 hingga 3 bulan lalu.

Begitu juga dengan penjemputannya, Sutiyoso mengaku mencapai lokasi kelompok bersenjata tersebut, menempuh perjalanan 3 hingga 4 jam, sejak Senin (28/12).

Ia juga mengaku, setelah menjemput, dirinya lama berbicara dengan Din Minimi hingga malam hari masih berada di kediaman Din Minimi di Desa Ladang Baro.

Terkait penyelesaian terhadap kelompok Din Minimi yang diwarnai rasa kekeluargaan, Sutiyoso mengaku sangat senang. Serta model penyelesaian yang dilakukan tersebut, akan diterapkan di daerah lain yang memiliki permasalahan serupa.

Ia mengakui, dalam proses penjemputan dan penyelesaian terhadap kelompok Din Minimi, pihaknya terlebih dahulu sudah berkoordinasi dengan Presiden dan pihak-pihak terkait lainnya di pemerintahan pusat.

Apa yang dilakukannya itu mendapat respon yang baik terhadap penyelesaian kelompok bersenjata era pascakonflik Aceh tersebut, kata Sutiyoso. /Zaenal Arifin-Ant

Jakarta Terancam, Privatisasi Air Ahok Didukung Kebijakan Ekonomi Jokowi

Paket kebijakan ekonomi VI yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo dianggap melanggar keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Alldo Fellix Januardy dari Divisi Penelitian dan Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan kebijakan Paket Ekonomi VI melanggar putusan PN Jakpus Nomor 527/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst dan MK Nomor 85/PU-XI/2013.

Munculnya Kebijakan Paket Ekonomi VI Jokowi, diakui Alldo, telah kandaskan gugatan LBH Jakarta ke Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait privatisasi



air. Padahal LBH Jakarta sudah menang di PN Jakpus dan MK.

Tapi usai dikeluarkannya putusan dari PN Jakpus dan MK, Jokowi malah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi itu. “Kebijakan ini justru membenarkan terjadinya pengelolaan air oleh pihak swasta. Dan itu mengancam hak sembilan juta warga DKI Jakarta atas akses air bersih,” imbuh Alldo.

Ditambahkan Alldo, paket kebijakan Jokowi tidak sejalan dengan Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945. Yang menyebut bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. “Air merupakan bagian dari HAM dan tidak dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain selain negara,” ujar Alldo.

Dengan alasan-alasan itu, LBH Jakarta mendesak Jokowi batalkan paket kebijakan ekonomi VI yang bertentangan dengan putusan PN Jakarta Pusat, MK dan UUD 1945.

LBH Jakarta juga menuntut Ahok untuk mematuhi putusan tersebut dan mengembalikan pengelolaan air di Jakarta ke Pemprov DKI. Saat ini kasus privatisasi air sedang proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. /M Vidia Wirawan

Citra atau Celaka?

Oleh : Jong Lisa, Peneliti muda pada Lembaga Pemilu Indonesia

Beberapa pekan berlalu, Indonesia masih dibuat pusing oleh kelakuan segelintir elit pecundang. Setelah sidang etik Setya Novanto wacana bergeser setelah politisi Beringin itu menggugat balik. Rekannya, Riza Chalid, bahkan mengancam membeberkan bobrok pejabat negara melalui media sosial. Apa arti semua ini?

Tentang kasus ini, para ahli sudah membuat banyak analisis dari aspek korupsi dan moral politik. Namun belum banyak yang melihat bagaimana dampak kasus ini terhadap citra partai. Pentingnya kasus “papa minta saham” dikaitkan dengan citra partai merupakan upaya kita membangun demokrasi yang sehat. Bagaimanapun, perilaku politisi yang anti-demokrasi perlu diadili secara massal oleh kekuatan publik meskipun mekanismenya tidak langsung, tetapi melalui pemilihan umum, baik di tingkat pusat maupun lokal.

Untuk itu, kita perlu mendiskusikan beberapa hal yaitu (1) peran media dalam komunikasi politik, (2) hubungan perilaku kader dan citra partai, dan (3) formula penghakiman publik terhadap partai politik.

Komunikasi dan Pasar politik

Sebagian orang bingung kenapa partisipasi politik dalam pilkada serentak 9 Desember 2015 menurun dibandingkan pilkada sebelumnya. Logikanya sederhana bahwa berbicara politik, ada kesamaan signifikan dengan bisnis. Keduanya memerlukan strategi *branding* untuk menjual, membangun loyalitas, dan sama-sama bekerja dalam pasar dengan tingkat persaingan tinggi (Kotler & Keller, 2006: 153). Kalau

perusahaan mengejar laba, politik pun berbicara untung.

Loyalitas konsumen adalah kunci keberhasilan pemasaran jangka panjang di tengah persaingan bisnis yang tinggi. Begitu juga dengan politik. Keberhasilan partai ditentukan oleh loyalitas konstituen yang juga menjadi *influencer* pada lingkungan dimana politik bekerja.

Loyalitas ini sudah rusak bukan saja karena pengaruh politik uang,

tetapi juga karena partai gagal membangun komunikasi yang intensif dengan konstituen.

Kalau kita perhatikan, partai politik umumnya memakai media *mainstream* sebagai sarana membentuk opini masyarakat melalui racikan berita. Pemberitaan besar media terhadap skandal “papa minta saham” jelas berdampak pada partai politik yang mendukung para pelaku. Situasi ini diperkuat oleh lemahnya komunikasi





interpersonal antara partai dan konstituen padahal Deutschmann dan Danielson dalam Rogers (2003) menekankan pentingnya komunikasi interpersonal dalam pasar politik. Komunikasi interpersonal melahirkan perubahan perilaku pada level individu. Loyalitas masyarakat dalam pasar politik dibentuk oleh model komunikasi ini.

Citra Politik

Dipahami sebagai kesan yang

diperoleh dari tingkat pengetahuan dan pengertian terhadap fakta, citra memainkan peran besar dalam politik modern (Kotler, 2006). Dalam pasar politik, citra adalah bagian dari unsur-unsur penting selain produk, harga, tempat, dan promosi (Band, 1987).

Dulu, PDI sebelum menjadi PDI Perjuangan, mendapat tekanan besar dari rejim Suharto. Citra sebagai “yang terzalimi” melekat pada partai ini sehingga pada pemilu 1999, setelah Suharto tumbang tahun 1998, PDIP mengukir sejarah sebagai pemenang pemilu. Pada masa reformasi, sebagian partai dominan kemudian mengalami antiklimaks karena korupsi politik. Citra mereka memburuk. Situasi ini memberi ruang bagi partai baru seperti Nasional Demokrat (NasDem) untuk muncul dan menjadi besar seketika.

Partai Golkar yang mengalami banyak kekalahan dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015 di seluruh Indonesia juga merupakan korban dari kehancuran citra. Selain karena pertikaian di tubuh partai, kasus Novanto juga memberikan kontribusi pada penurunan citra partai ini di mata khalayak politik.

Maka, selesai atau tidak selesai persidangan kasus Novanto tidak akan membantu Golkar untuk bangkit kembali. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu menata kembali citra Golkar. Untuk menata citra ini, tentu saja konflik internal harus diselesaikan dan ada upaya rekonsolidasi baru. Selain itu, Golkar perlu keberanian untuk membuang kader-kader yang menjadi beban bagi partai. Bahkan dengan meninggalkan Novanto, Golkar bisa memulihkan citranya yang

memburuk.

Boikot Partai Papa

Menjelang pilkada serentak 9 Desember lalu, di media sosial Twitter muncul tagar #boikotpartaipapa yang tampil bersama dengan foto berlatar kuning dengan coretan di pohon beringin. Tagar itu dimaksud mengajak para netizen Twitter untuk tidak memilih calon kepala daerah yang diusung oleh partai kuning tersebut.

Jelas ini adalah reaksi keras masyarakat atas skandal papa minta saham yang melibatkan kader partai tersebut. Meskipun kader yang terlibat hanya Novanto, namun efeknya membanjiri partai. Tidak heran kalau sikap skeptis masyarakat terbentuk dan merugikan para kandidat dari Golkar dalam pertarungan pilkada lalu. Nila setitik rusak susu sebelanga. Efek ini bisa berdampak jangka panjang kalau tidak ada strategi memulihkan citra seperti kita bahas di atas.

Manajemen ulang partai adalah upaya menata citra untuk kepentingan jangka panjang. Selain itu, riset pasar pun diperlukan. Riset pasar dimaksudkan untuk menjangkau opini publik. Kita sering melihat perusahaan menarik produk yang bermasalah dari peredaran (bahkan sebelum terjadi masalah). Partai politik pun mesti berbesar hati melakukan tindakan tegas dan nyata terhadap kader yang bermasalah karena citra buruk bisa menjadi celaka besar. Meninggalkan kader yang bermasalah adalah langkah cerdas seperti dicontohkan NasDem setelah kasus Rio Capela meskipun kasusnya masih kontroversial.◦

Kinerja Menteri Susi dalam Setahun Hanya Simbol-simbol

Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) berpendapat, manfaat yang telah dilakukan Susi kepada negara ini hanya sebatas simbol-simbol semata dan justru Susi yang dapat manfaat besar berupa popularitas.

Hal ini dikatakan terkait kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam satu tahun ini.

“Hal itu semakin dipertegas oleh lembaga survey Political Communication Institute yang merilis surveinya terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Hasilnya, Susi adalah Menteri paling populer namun popularitasnya berbanding terbalik terhadap kinerjanya. Itu artinya, pekerjaan Susi jeblok tapi dia malah jadi selebriti,” kata Junisab, di Jakarta, Minggu (27/12).

Agar lebih mempermudah publik memahaminya, IAW memaparkan beberapa audit publik terkait kinerja Susi. Pertama, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 19 Oktober 2015.

Perpres itu berpotensi besar digugat masyarakat karena bertentangan terhadap Undang-undang (UU) No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Kedua, materi aturan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2015 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan yang menaikkan pajak masyarakat dibidang perikanan antara 250% sampai sebesar 1.000%. Sangking tidak rasionalnya PP itu, fakta akhirnya menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak bisa berjalan layaknya seperti PP lain. Boleh dicek,” ujarnya.

Kemudian, lanjut mantan anggota Komisi III DPR RI ini, kebijakan



Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela dan Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Aturan itu melarang nelayan menangkap ikan memakai pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets).

Akhirnya, aturan itu banyak dilanggar oleh para nelayan. Bahkan aturan itu sedang *dijudicial review* masyarakat ke Mahkamah Agung RI.

“Susi bisa melihat langsung aturan itu dilanggar nelayan di wilayah Pandegelang, Banten. Bahkan aparat hukum disana menunjukkan sikap ‘pro’ kepada nelayan. Kami melakukan survei nelayan di Desa Teluk, Kecamatan Panimbangan, Kabupaten Pandegelang, Banten,” kata dia.

Keempat, masih menurut Junisab, Permen KP Nomor 1 tahun 2015 tentang larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan dalam keadaan bertelur dan ukuran

minimal. Ternyata itu juga tidak efektif, malah banyak tuduhan bahwa diduga kuat itu terkait bisnis lobster Susi.

“Kelima, Susi telah gagal menyerap APBN 2015. Kementerian Perekonomian menyatakan bahwa Kementerian Kemaritiman yang terendah menyerap APBN, salah satunya KKP yang baru terserap 28,2 persen dari pagu Rp 10,5 triliun,” jelasnya.

Terakhir, dari sektor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian yang digawangi Susi sangat rendah. Bahkan lebih rendah kurun 10 tahun terakhir.

Junisab menambahkan, audit ini bisa menjungkirbalikkan popularitas Susi secara seketika.

“Masa Susi meminta naik anggaran pada 2016. Padahal dalam APBN 2015 saja anggaran yang tidak terserap hingga Rp2 triliun. Kinerja Susi itu sudah seperti logika yang dibolak-balik seperti saat masa kanak-kanak kita bermain dadu. Jadi keuntungan apa yang bisa didapatkan negara ini dari Susi?” tutupnya.

/Karel Stefanus Ratulangi-Ant



DPR Harap Pemerintahan Jokowi-JK di 2016 Perbaiki Manajemen Politiknnya

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan bahwa selama satu tahun dua bulan jalannya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang berniat untuk memajukan pembangunan infrastruktur di setiap wilayah di Indonesia, merupakan niat yang baik.

Namun, keinginan itu harus ditunjang dengan kondisi politik yang tetap stabil.

“Niat (baik) itu dengan proyek besar harus diimbangi dengan stabilitas politik yang stabil, karena akan berdampak pada kelancaran proses proyek dan stabilitas ekonomi,” kata Fahri ditulis Minggu (27/12).

Fahri berharap agar di tahun 2016 pemerintahan Jokowi-JK dapat melakukan konsolidasi kabinetnya dan menata kembali manajemen politik, sehingga tidak ada lagi kegaduhan politik terutama antara eksekutif dengan legislatif sebagai pengawas.

“Karena kedepannya, pemerintah dalam anggaran belanjanya (di tahun 2016) akan di atas Rp2.000 triliun, sehingga diperlukan adanya stabilitas politik yang baik, tidak ada lagi argumen yang sifatnya pencitraan, melainkan semua harus terlaksana, karena sudah pemerintah ini sudah menggunakan 2 tahun menjadi kuasa anggaran,” tandas politikus PKS itu.

/Zaenal Arifin



LPI Luncurkan Evaluasi Kabinet Kerja

Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) meluncurkan laporan evaluasi kabinet kerja Jokowi-JK, sebanyak 97 halaman bertajuk, “Catatan Politik: Evaluasi Kualitatif Kinerja Kabinet Kerja 2014-2019 Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla” di Jakarta, Minggu 20 Desember 2015.

Direktur LPI Boni Hargens mengatakan, evaluasi ini merupakan bentuk telaah kualitatif yang menyajikan secara objektif kemajuan mundurnya kinerja setiap program dan aktivitas di kementerian.

“Tidak semua program dan aktivitas di kementerian diangkat dalam sajian ini, hanya beberapa program atau aktivitas yang kami nilai representatif untuk menilai kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah berhasil mewujudkan pembangunan di segala lini,” ungkap Boni.

Boni melanjutkan melihat kondisi selama tahun 2015, LPI melihat ada harapan dan keyakinan bahwa dalam tahun-tahun ke depan, pemerintahan akan jauh lebih berhasil.

Dalam evaluasinya, LPI menyebut sejumlah menteri berkinerja baik, antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri PAN-RB, Menteri Perhubungan, Sekretaris Kabinet, Menkominfo, Menko Kemaritiman, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Lingkungan dan Kehutanan, Menteri Sosial, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pariwisata, Panglima TNI dan Kapolri.

“Kementerian-kementerian lain juga melakukan kemajuan, tetapi masih perlu peningkatan yang signifikan dalam kinerja,” jelas Boni.

Selebihnya, tambah dia, LPI menyerahkan kepada publik sepenuhnya untuk menilai apakah menteri-menteri berhasil atau gagal dalam mewujudkan Nawacita.

Evaluasi LPI kali ini dilengkapi dengan Focused Group Discussion (FGD) yang melibatkan para pakar

dari Universitas Indonesia (UI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang diadakan di Hotel Green Alia Cikini, Jakarta pada 12 Desember 2015.

Sementara itu yang menjadi faktor evaluasi, ada lima dimensi yakni politik, hukum, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan.

Pada acara pemaparan evaluasi tersebut, menghadirkan beberapa narasumber, antara lain Eko Sulystio dari Kantor Staf Kepresidenan Deputi IV Bidang Komunikasi Politik; Rosarita Niken Widiastuti, Direktur Utama LPP RRI; Sinyo Harry (SH) Sarundajang, Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia; J Ordar, Wartawan Senior Kompas; Fahri Ali, Peneliti LIPI dan Ferdy Hasiman, peneliti LPI.

Pada kesempatan tersebut SH Sarundajang mengatakan, jika Indonesia berangsur-angsur menjadi negara yang mampu melembagakan demokrasi, meski masih terdapat banyak hal yang mesti dibenahi. Hal ini merujuk kepada penyelenggaraan Pemilu tahun lalu yang dinilai aman, damai dan hampir tanpa gejolak.

“Realitas ini memperlihatkan bahwa bangsa kita yang sangat majemuk dan heterogen berhasil melembagakan sistem demokrasi, sehingga dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah India dan Amerika Serikat,” katanya.

Disisi lain, Sinyo juga mengapresiasi penyelenggaraan Pilkada serentak pertama di 264 daerah pada 9 Desember lalu, yang berlangsung secara aman, damai dan kondusif.

“Pilkada serentak yang berlangsung relatif aman dan damai ini bukan semata-mata prestasi KPU dan KPU Daerah, melainkan prestasi kita semua, prestasi bangsa kita,” pungkas dia. /Deddy K





DAFTAR KORUPSI

KASUS PE

PT. Mcinsey Indonesia PT. Price Waterhouse Coopers



Temuan Audit

Kelebihan Pembayaran Pengadaan
Jasa Konsultasi

Perkiraan Kerugian

Rp. 21.466.083.490 & USD 71.99

Klasifikasi Dugaan Pelanggaran

Berpotensi Pidana

Rothschild (Singapore) Limited



Temuan Audit

Pemenangan jasa konsultasi
penasihat keuangan independen
pembangunan Terminasi Kalibaru

Perkiraan Kerugian

USD 350.000

Klasifikasi Dugaan Pelanggaran

Berpotensi Pidana

PT. Sucofindo II



Temuan Audit

Pengadaan Pekerjaan Pencatatan
Kebenaran ukuran barang/ volume
Kalibaru

Perkiraan Kerugian

Rp. 16.004.942.100

Klasifikasi Dugaan Pelanggaran

Berpotensi Pidana

PT. LEN Industri (Persero)



Temuan Audit

Pelaksanaan pengadaan dua unit
crane simulator dan satu unit ship
simulator

Perkiraan Kerugian

(nilai kontrak) **Rp. 11.090.923.000**
Rp. 1.005.683.650

Klasifikasi Dugaan Pelanggaran

Berpotensi Pidana

PT. Wijaya Karya (Persero) (Pengawasan pekerjaan: PT hasfarm Dian Konsultan)



Temuan Audit

Pekerjaan pembangunan gedung
pusat pelatihan kepelaubuhan PT.
Pelindo II di Ciawi

Perkiraan Kerugian

Rp. 175.210.000.000

Klasifikasi Dugaan Pelanggaran

Pelanggaran Administrasi

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Persero)



Temuan Audit

Pekerjaan pengembangan layanan
information and communication
technology (ICT)

Perkiraan Kerugian

RP. 105.093.610.134

Klasifikasi Dugaan Pelanggaran

Berpotensi Pidana

Wuxi Hua dong Heavy Machinery, Co, Ltd.



Temuan Audit

Pengadaan alat bongkar muat untuk
dua unit Quayside Container Cranes
(QCC)

Perkiraan Kerugian

USD 11.180.000

Klasifikasi Dugaan Pelanggaran

Pelanggaran Administrasi
Berpotensi Pidana

Wuhan Machinery Plant, Co, Ltd



Temuan Audit

Pengadaan alat bongkar muat gantry
Luffing Crane, Gantry Jib Crane, Fixed
jib Crane

Perkiraan Kerugian

USD 29.203.30
& Rp. 1.650.000.000

Klasifikasi Dugaan Pelanggaran

Berpotensi Pidana

ELINDO II



Wuxi Hua dong Heavy Machinery, Co, Ltd

Temuan Audit
Pengadaan 3 unit Quaside Container Cranes (QCC) Twinlift Tahun 2010

Perkiraan Kerugian
Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan USD 777.700

Klasifikasi Dugaan Pelanggaran
Berpotensi Pidana



PT. Lloyd Register Indonesia

Temuan Audit
Jasa Konsultasi Pengawasan pengadaan 3 unit QCC

Perkiraan Kerugian
Rp. 4.500.000.000

Klasifikasi Dugaan Pelanggaran
Pelanggaran Administrasi Berpotensi Pidana



Guangxi narishi Century Equipment Co, Ltd

Temuan Audit
Pengadaan 10 mobile crane

Perkiraan Kerugian
Rp. 456.000.000

Klasifikasi Dugaan Pelanggaran
Pelanggaran Administrasi



PT. Pembangunan Perumahan (Persero)

Temuan Audit
Pengenaaan Cost of Fund terhadap uang muka pekerjaan pembangunan Terminal Peti Kemas kalibaru Utara Tahap 1

Perkiraan Kerugian
Rp. 75.943.438.929

Klasifikasi Dugaan Pelanggaran
Berpotensi Pidana



PT. Pembangunan Perumahan (Persero)

Temuan Audit
Mega proyek pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru Utara tahap 1

Perkiraan Kerugian
(nilai kontrak) **Rp. 9.029.674.888.708**

Dugaan kerugian dalam penyusunan HPS Rp. 269.706.512.057

Dugaan kerugian dalam pekerjaan Formwork A-Jack yang digunakan produksi A-Jack Rp. 22.374.841.126

Klasifikasi Dugaan Pelanggaran
Berpotensi Pidana Potensi Pidana




PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Temuan Audit
Pekerjaan Perpanjangan Dermaga dan Perluasan Lapangan Car Terminal serta Pembangunan Jalan Akses Kalibaru

Perkiraan Kerugian
Rp. 912.731.317.927

Klasifikasi Dugaan Pelanggaran
Potensi Pidana




PT. Waskita (Persero) Tbk.

Temuan Audit
Pekerjaan Perpanjangan Dermaga dan Perluasan Lapangan Car Terminal serta Pembangunan Jalan Akses Kalibaru

Perkiraan Kerugian
Rp. 44.017.292.000

Klasifikasi Dugaan Pelanggaran
-



PT. Wihaya Karya (Persero) Tbk.

Temuan Audit
Markup nilai harga satuan pekerjaan pembesan dan beton dalam kontrak pekerjaan perkuatan dan peninggian lapangan penumpukan, pembangunann jalan RTGC dan perkuatan serta peninggian jalan yang di laksanakan oleh PT. Wijaya karya (Persero) Tbk. pada tahun 2013 kanor cabang pelabuhan.

Perkiraan Kerugian
Rp. 777.961.581

Klasifikasi Dugaan Pelanggaran
Potensi Pidana

Pak JK, Sudahlah...

Presiden Joko Widodo wajib hukumnya memberhentikan Rini Soemarno dari jabatannya sebagai Menteri BUMN. Bila Presiden bergeming atas rekomendasi Pansus Pelindo II, DPR akan menggalang hak menyatakan pendapat yang bisa berujung pada pemakzulan.

Sebagai menteri, Rini dianggap telah lalai mengawasi kinerja PT Pelindo II yang dipimpin RJ Lino. Ia melakukan pembiaran secara sengaja terhadap tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 ayat 2a dan Pasal 24 ayat 2 serta UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 14 ayat 1.

Pembiaran itu diantaranya dalam pengadaan barang dan jasa, perpanjangan pengelolaan PT JICT dan tata kelola perusahaan PT Pelindo II, pembiaran terjadinya pelanggaran hukum dan ketenagakerjaan di Pelindo II, serta dalam program pembangunan dan pembiayaan terminal Pelabuhan Kalibaru.

“Pansus sangat merekomendasikan kepada Presiden RI untuk menggunakan hak prerogatifnya memberhentikan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN,” tegas Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka di ruang sidang paripurna DPR RI, Kamis (17/12).

Selain Rini, sidang paripurna DPR juga menyetujui laporan tahap satu dan merekomendasikan agar Menteri Rini segera memberhentikan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino.

Pansus mendapatkan fakta bahwa Dirut Pelindo II telah bertindak dengan tidak memenuhi asas umum pemerintahan yang baik. Yakni dengan tidak mematuhi ketentuan di dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Anti KKN.

Pemberhentian Rini dan Lino ini merupakan dua dari tujuh poin rekomendasi Pansus Pelindo II. Lima poin lainnya adalah, pertama meminta pembatalan perpanjangan kontrak JICT tahun 2015-2038.

Kedua, meminta OJK menyelidiki dugaan adanya *conflict of interest* dan manipulasi oleh

Wapres Jusuf Kalla mengikuti rapat terbatas membahas penanganan radikalisme ISIS, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/12).

Deutsche Bank dalam melakukan evaluasi selaku konsultan dan dalam memberikan pinjaman sindikasi bank luar negeri selaku kreditur.

Ketiga, Pansus Pelindo II sangat merekomendasikan dihentikannya pelanggaran terhadap UU Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Perusahaan juga harus mempekerjakan kembali karyawan yang telah mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

Keempat, Pansus Pelindo II sangat merekomendasikan Pansus Pelindo II merekomendasikan aparat penegak hukum untuk melanjutkan penyidikan atas pelanggaran UU yang mengakibatkan kerugian negara.

Terakhir, Pansus Pelindo II sangat merekomendasikan Presiden untuk tidak serta-merta membuka investasi asing yang dalam jangka panjang merugikan bangsa Indonesia secara moral dan materiil mengancam keselamatan negara dan kedaulatan ekonomi politik bangsa.

Politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan,





rekomendasi Pansus Pelindo bersifat wajib untuk ditindak lanjuti jika Presiden benar-benar mentaati konstitusi dan Undang-Undang (UU) yang berlaku.

“Pembuktian pelanggaran konstitusi dan peraturan undang-undang sudah ada dasar hukumnya. Kalau Presiden mau dengar silakan, sehingga tentu saja kalau Presiden taat konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Wajib hukumnya Presiden menindaklanjuti rekomendasi DPR,” ujar Rieke.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi dengan santai terkait hal ini. Bila DPR menyatakan rekomendasi wajib dijalankan Presiden, ia menyebut rekomendasi hanya sebatas saran politik sehingga tidak harus dilaksanakan. Bagaimanapun, pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Apalagi keputusan besar pemberhentian Rini Soemarno.

Pernyataan JK ini memantik reaksi keras dari parlemen. JK akhirnya harus memberikan

pernyataan kembali bahwa rekomendasi Pansus Pelindo II, khususnya soal pemberhentian Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN, akan diperhatikan. Meski demikian, ia tetap melihat rekomendasi bukanlah suatu keputusan

“Ya dipertimbangkan kan juga ditindaklanjuti. Gimana, kan rekomendasi bukan keputusan kan namanya rekomendasi masa tidak diperhatikan. Diperhatikan, cuma bukan hanya itu diperhatikannya. Selama rekomendasi bunyinya kita perhatikan pasti,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin pekan lalu.

Pemberhentian Rini dan Lino, ucapnya, perlu mempertimbangkan aspek lainnya. Seperti aspek hukum yang membuktikan bahwa keduanya melakukan pelanggaran.

Di sisi lain, Rizal Ramli yang sejak awal turut mengungkap kebobrokan kinerja Lino di Pelindo II, mendukung tindaklanjut rekomendasi Pansus Pelindo II. Menko Maritim dan Sumber Daya meminta semua pihak untuk menghormati dan menjalankan rekomendasi DPR sesuai aturan yang ada.

Lepas dari rekomendasi pemberhentian Lino dan Rini, menteri yang dikenal ceplas-ceplos itu mengaku apa yang disampaikan soal Lino sejak awal adalah benar. Apa yang digembar-gemborkan bukanlah pepesan kosong.

Terlebih rekomendasi diperkuat dengan penetapan tersangka Lino oleh Komisi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (Menko Maritim) Rizal Ramli (tengah) didampingi Otto Hasibuan menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Pansus Pelindo II di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10/2015).



Pemberantasan Korupsi (KPK). Utamanya terkait konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) dan pengadaan *Quay Container Crane* tahun 2010.

“Fakta ini menunjukkan Menko Rizal Ramli tidak asal bicara, tetapi dia memiliki data dan informasi yang cukup tentang situasi PT Pelindo II, termasuk juga data soal kasus Freeport dan Blok Masela,” kata Jubir Kementerian Kemaritiman dan Sumber Daya, Shahandra Hanitio.

Hidden Agenda

Rieke menyebut pernyataan JK bahwa rekomendasi hanya saran politik menjerumuskan Presiden Jokowi. Sebab pernyataan itu sama saja memberikan jalan bagi Presiden untuk melanggar aturan, yang dengannya Presiden bisa dimakzulkan. Dengan adanya pemakzulan inilah Wapres kemudian menggantikan posisi Presiden.

“Mungkin sebaiknya Pak JK konsultasi dengan pakar hukum tata negara supaya tidak sesat logika penafsiran konstitusi dan undang-undang. Saya tidak enak kalau harus menyanggah seorang Wakil Presiden untuk menjelaskan apa bedanya pansus dengan pansus angket yang dibentuk DPR RI dalam nomenklatur UU yang berlaku di Republik Indonesia,” katanya.

Ditambahkan, hasil temuan pansus, baik berupa dokumen maupun pernyataan RJ Lino dan Meneg BUMN yang disampaikan di bawah sumpah dan dalam rapat terbuka, akan sangat sulit bagi keduanya mengelak dari pembuktian telah melakukan pelanggaran.

“Jika Presiden tidak tindaklanjuti, karena percaya pernyataan Pak JK bahwa rekomendasi pansus angket hanya saran politik yang tidak perlu ditindaklanjuti, maka Presiden bisa dikategorikan melakukan pembiaran,” kata dia.

Apabila Presiden melakukan pembiaran, maka hal itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Presiden katanya bahkan bisa disebut telah melakukan pemufakatan dengan melanggar UUD 1945, putusan Mahkamah Konstitusi, UU dan peraturan perundangan lainnya.

“Artinya, Presiden juga lakukan kesalahan serius dan fatal yang berarti harus dicopot dari jabatannya. Kalau Joko Widodo, diberhentikan dari jabatannya, yang menggantikan jadi Presiden siapa ya?,” tambah Rieke lagi.

Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menilai pernyataan JK dengan menyebut rekomendasi Pansus Pelindo tahap pertama hanya sebagai saran politik sebagai sikap yang keliru. Meski begitu, ia meyakini



Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka menyerahkan berkas hasil temuan-temuan pada Pimpinan dan Wakil Rapat Paripurna DPR RI Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan pada sidang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Presiden akan mengambil langkah cerdas dan tidak termakan manuver JK.

Jika tidak melaksanakan rekomendasi, sama saja Presiden Jokowi melanggar hukum, karena rekomendasi memiliki derajat mengikat dan harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Pansus, menurutnya adalah alat dan atau hak pengawasan DPR terhadap pemerintah. Pada titik itulah, DPR sebagai pemegang hak kontrol pemerintah memberikan rekomendasi bagi jalannya pemerintahan yang lebih baik.

Jika DPR sudah memberikan rekomendasi dan pemerintah tidak melaksanakan maka melanggar kewajiban karena apa yang dilakukan DPR adalah selaku pemegang hak kontrol pemerintah,” tutur Margarito.

Dijelaskan, bila Presiden tidak mencopot Rini Soemarno maka DPR bisa melayangkan



protes kepada pemerintah dengan menggulirkan hak menyatakan pendapat yang diambil melalui paripurna, kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan bisa berujung pada pelengseran (impeachment) Presiden.

“Jika tidak melaksanakan rekomendasi Presiden bisa di-*impeachment* dengan tahapan itu. Berarti ada perbuatan tercela yang dilakukan Presiden. Ini tanggung jawab individu Presiden, bukan Wapres. Jadi Pak Jokowi jangan sampai terjebak,” jelasnya.

“Saya lugas, laksanakan rekomendasi Pansus, Presiden jangan mengikatkan diri pada pikiran dan saran Pak JK, jangan sampai kelak terjebak dan dalam posisi sulit. Jika hak menyatakan pendapat digunakan, akan menimbulkan gonjang-ganjing lagi. Maka saran saya, abaikan saran Pak JK, anggap tidak ada karena Pak Jokowi Presidennya,” tambah dia.

JK, Sumber Kegaduhan

Masinton Pasaribu, rekan Rieke di Pansus Pelindo, menyebut Wapres Jusuf Kalla dalam dari sejumlah kegaduhan di pemerintahan belakangan ini. Kegaduhan demi kegaduhan itu tidak lepas dari sumber kegaduhan itu sendiri. Dan, sumber kegaduhan itu adalah JK.

Berbicara dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Minggu pekan lalu, ia mengungkapkan bagaimana JK sejak awal sudah menciptakan kontroversi dengan proyek pengadaan listrik 35 ribu mega watt yang pernah dikritik Rizal Ramli. Akan tetapi, JK bergeming dan membela proyek tersebut.

Dalam kasus Pelindo II, JK bahkan terang-terangan menunjukkan keberpihakannya kepada Lino. Padahal JK pernah berjanji tidak akan memanfaatkan otoritas kekuasaannya untuk kepentingan bisnis.

“Dirut-nya (Lino) telepon sana-sini. Yang dari Seoul, telepon supaya tidak dilanjutkan. Kabareskrim saat itu (Budi Waseso), yang copot JK juga. Menteri ESDM, JK juga,” katanya.

“Pak JK pada awal dipasangkan dengan Jokowi mengatakan, ‘Saya sudah tua, sudah pernah jadi Wapres. Saya tidak akan gunakan ini untuk kepentingan bisnis saya. Saya ingin mengabdikan diri pada bangsa’. Nah itu yang harus kita tagih janjinya,” tegas Masinton.

Menurut Masinton, kegaduhan politik dan pemerintahan akan muncul ketika seseorang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan bisnis. Ia merujuk pada pemerintahan orde baru yang saat itu dipimpin Presiden Soeharto.

“Otoritas kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan bisnis akan memunculkan kegaduhan. Lihat saja Soeharto kan mulai banyak dikritik saat anak-anaknya menggunakan kekuasaan bapaknya (Presiden) untuk kepentingan bisnisnya. Apa yang mereka kerjakan tidak sesuai dengan Nawa Cita. Apa yang mau dipertahankan? Sudah tidak ada alasan untuk tidak mengganti,”

Mengutip lirik lagu ‘Pengkhiatan’ karya putra Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Muhammad Prananda Prabowo, bahwa dalam arus perubahan sesuai hukum alam selalu menciptakan siapa kawan dan siapa lahan. Dalam setiap perubahan itu pula, Prananda menyebut pada prosesnya akan melahirkan pengkhianatan.

Pengkhianatan ini sangat berbahaya karena datangnya tak terendus. Akan tetapi, lanjut Ketua Bidang Ekonomi Kreatif DPP PDI Perjuangan itu, suatu saat pengkhianatan tersebut tiba-tiba bisa menikam jantung perjuangan. ◦

Soemitro

“Dwelling Time” dan Konflik Kepentingan di Pelindo II

Upaya mempersingkat “*dwelling time*” di Pelabuhan Tanjung Priok tidak bisa berjalan mulus. Pasalnya, Pelindo II dan pihak swasta pengelola TPS justru punya kepentingan yang sama untuk memperlama “*dwelling time*.”

Direktur Utama PT Pelindo II (Persero), Richard Joost Lino, sejak 23 Desember 2015 sudah resmi diberhentikan oleh pemegang saham Pelindo II, yakni Kementerian BUMN. Lino diminta untuk berkonsentrasi terhadap kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lino ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 3 unit *Quay Container Crane* (QCC) tahun 2010. Dia diduga menyalahgunakan wewenang dan memperkaya diri sendiri, karena langsung menunjuk perusahaan asal China, Wuxi Huadong Heavy Machinery Co, Ltd.

Lino menjabat sebagai Dirut Pelindo sejak 2009. Diberhentikannya Lino, karena sudah berstatus tersangka pelaku korupsi oleh KPK, menjadi babak baru dalam drama kekisruhan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok. Tuduhan korupsi pengadaan barang dan jasa terhadap Dirut Pelindo II bukanlah satu-satunya masalah di sana. Masalah lain yang sangat terkait dengan upaya menyukseskan program Poros Maritim dan Tol Laut dari Presiden Joko Widodo adalah soal *dwelling time* di pelabuhan tersebut.

Salah satu ukuran keberhasilan dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok adalah pengurangan lamanya waktu inap dan bongkar-muat barang (*dwelling time*), yang ternyata masih cukup panjang. *Dwelling time* yang panjang ini menjadi penghambat dalam upaya pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok di daerah-daerah, yang terkait biaya logistik. Akibat *dwelling time* yang lama, perputaran roda ekonomi menjadi lambat dan biaya logistik menjadi sangat tinggi, sehingga harga berbagai kebutuhan di daerah terpencil juga sangat melonjak. Ujung-ujungnya masyarakat juga yang susah.

Satgas *Dwelling Time* yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menegaskan, Pelindo II merupakan pihak yang

memiliki andil terhadap lamanya waktu inap barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Bahkan, BUMN pelabuhan itu meraup untung yang besar bila *dwelling time* semakin lama.

“Pelindo II ini kan penyedia jasa. Mereka termasuk bagian yang mendapatkan keuntungan dari lamanya *dwelling time*. Karena kan semakin lama kontainer ditimbun, semakin banyak *fee*-nya. Yang menikmati kan mereka (Pelindo II),” ujar Ketua Satgas *Dwelling Time* dan Deputi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono, di Jakarta, 23 September 2015.

Ketidakberesan di Tanjung Priok

Para pengguna jasa Pelabuhan Tanjung Priok sadar, ada ketidakberesan dalam tata kelola Pelabuhan Tanjung Priok. Panitia Khusus Angket Pelindo II di DPR RI telah mengungkap satu-persatu permasalahan yang ada. Selain permasalahan pengadaan barang dan jasa, pembangunan Pelabuhan Kalibaru merupakan masalah lain yang harus diungkap oleh Pansus Pelindo II. Ada potensi kerugian yang sangat besar di proyek-proyek tersebut.

Semua hal ini menuntut tindak lanjut yang cepat dari pemerintah. Presiden Indonesia Port Watch, Syaiful Hasan, pada 16 Desember 2015 mengatakan, masalah-masalah di Pelindo II menjadi pelik ketika tidak ada fungsi pengawasan dan penindakan dari Kementerian BUMN. Jika ini tidak ditangani, sampai kapan pun biaya logistik yang ditanggung masyarakat



Dirut Pelindo RJ Lino saat menjawab pertanyaan Pansus Pelindo II di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (4/12).

akan tetap tinggi.

Sementara itu, Agung Kuswandono menjelaskan, perilaku menimbun barang di Pelabuhan Tanjung Priok tidak hanya menguntungkan Pelindo II, namun para importir “nakal” juga ikut-ikutan senang. Pasalnya, importir tak perlu mencari dan menyewa gudang sebagai tempat penampungan barang, yang diperkirakan harga sewanya lebih mahal daripada menimbun barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

Dengan perilaku Pelindo II dan importir “nakal” yang seperti itu, waktu keluar barang dari Pelabuhan Tanjung Priok menjadi lama. “Bahkan, akan percuma saja pemberian dokumen perizinan dipercepat, bila para importir tak mau mengeluarkan kontainer dari pelabuhan. Penumpukan peti kemas akan terjadi dan akan menghambat keluar-masuk barang lainnya,” ujar mantan Dirjen Bea Cukai itu.

Lebih parah lagi, meski perilaku Pelindo II berpengaruh terhadap *dwelling time*, pihak Pelindo II tidak mau disalahkan begitu saja. Dirut Pelindo II RJ Lino selalu menyatakan, urusan *dwelling time* di Pelabuhan Tanjung Priok bukanlah urusan Pelindo II. Lino beralasan, kewenangan pemberian perizinan barang yang masuk ada di tangan beberapa kementerian dan lembaga, dan bukan di tangan Pelindo II selaku penyedia layanan pelabuhan.

Uraian permasalahan lebih jauh dituturkan oleh Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Masita. Zaldy pada 13 September 2015 menyatakan, tempat penampungan sementara (TPS) menjadi salah satu penyebab lamanya *dwelling time* di Pelabuhan Tanjung Priok. Semakin lama kontainer menumpuk di area TPS, kian banyak keuntungan yang diraih pihak swasta pengelola TPS.

Peran TPS ini adalah mengelola tempat timbun sementara, sebelum kontainer diperiksa pihak Bea-Cukai. Mereka juga berperan dalam memindahkan kontainer dari container yard (CY) ke lini 1, dan memuat kontainer ke truk untuk keluar, setelah diperiksa Bea-Cukai.

Bagi Hasil dengan Pihak Swasta

Masalahnya, keberadaan TPS-TPS di Pelabuhan Tanjung Priok tidak dioperasikan oleh Pelindo II. Ini berbeda dengan operasi TPS di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, yang dikelola sendiri oleh Pelindo III. TPS yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok dikelola swasta dengan sistem bagi hasil dengan Pelindo II. Hal ini menunjukkan adanya konflik kepentingan dari Pelindo II, yang akan mendapat penghasilan lebih besar dengan semakin lamanya *dwelling time*.

Di satu sisi, petinggi Pelindo II diinstruksikan pemerintah untuk memotong *dwelling time* menjadi sesingkat mungkin. Namun, jika hal ini dilakukan, penghasilan Pelindo II dari bagi hasil dengan pihak swasta pengelola TPS tentu akan berkurang. Apakah Pelindo II “ikhlas” mengurangi penghasilannya?

Menurut Zaldy, seharusnya Pelindo II mengikuti pola yang dipakai Pelindo III di Teluk Lamong, di mana kehadiran TPS baru ada di lini 2. “Oknum-oknum di TPS banyak yang bermain untuk mendapatkan uang tambahan, bila pemilik barang ingin kontainernya cepat keluar,” tegas Zaldy. Zaldy mengatakan, perusahaan-perusahaan TPS adalah rekanan Pelindo II. Maka, perlu diinvestigasi seperti apa hubungan antara pemilik TPS dan petinggi di Pelindo II.

Agung Kuswandono juga mengakui bahwa keberadaan TPS merupakan salah satu penyebab waktu sandar kapal di Tanjung Priok menjadi lama. Penanganan kasus *dwelling time* masih terus dilakukan Polda Metro Jaya. Komisi BUMN di DPR RI membentuk panitia kerja untuk menelisik persoalan-persoalan yang terjadi di Pelindo II.

Lino pada 13 November 2015 mengatakan, hingga kini belum ada perbaikan berarti pada jangka waktu bongkar barang impor dari kapal hingga keluar pelabuhan. Pasalnya, 18 instansi terkait (Kementerian Lembaga/KL) di dalam proses *pre customs clearance* belum melakukan perbaikan. Saat ini, angka *dwelling time* rata-rata di Pelabuhan Tanjung Priok masih di atas 5 hari atau hampir sama saat Presiden Jokowi blusukan di Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu.

Lino menuturkan, isu *dwelling time* saat ini mulai meredup. Padahal, instansi terkait yang berperan dalam proses *dwelling time* belum melakukan perbaikan. Proses *pre customs* masih berjalan lambat khususnya pada angka deviasi. Belum ada standar pelayanan dan kepastian waktu untuk pengurusan dokumen pada proses *pre customs*. “Standar deviasi kebesaran, yakni ada 1 hari, 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 6 bulan, yang bikin nggak pasti,” jelasnya.

Meski belum ada perbaikan berarti, Lino mengatakan untuk proses *customs clearance* dan *post customs clearance* barang impor sudah berjalan baik. Namun, standar layanan *pre customs* pada 18 KL belum seragam. Menurut Lino, solusi dari persoalan *dwelling time* adalah memperbaiki standar deviasi yang ditentukan oleh proses pengurusan pada *pre customs*, bukan sekedar membangun infrastruktur pelabuhan baru atau membangun jalur kereta. o Satrio Arismunandar

Susahnya Menggusur Rini Sang “Pemain Samping Serba Guna”

Hasil Pansus Pelindo II setidaknya menelorkan dua hal penting yang punya dimensi politis. Pertama, Pansus sangat merekomendasikan kepada menteri BUMN untuk segera memberhentikan Dirut Pelindo RJ Lino.

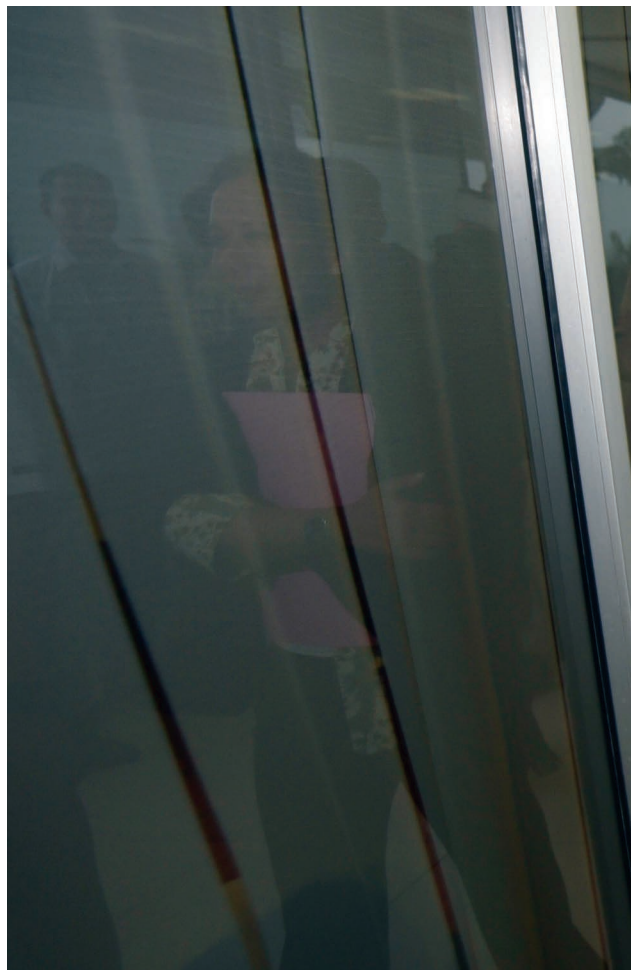
Kedua, Pansus Pelindo II menemukan fakta bahwa menteri BUMN dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Karena itu, Pansus sangat merekomendasikan kepada Presiden untuk menggunakan hak prerogratifnya memberhentikan Menteri BUMN Rini Sumarno.

Untuk perkara yang pertama, sepertinya proses sedang bergulir dan agaknya hanya soal waktu saja RJ Lino bakal diseret ke meja hijau. Tapi untuk perkara yang kedua, mencopot Rini Sumarno dari jajaran kabinet pemerintahan Jokowi-JK, sepertinya tidak akan segampang itu.

Menggusur RJ Lino, meskipun punya temali kuat dengan Wapres Jusuf Kalla dan para kroni bisnisnya, dalam logika permainan catur tingkat tinggi, Dirut PT Pelindo II ini memang dengan mudah akan dikorbankan. Apalagi temuan Pansus II memang bikin situasi jadi runyam, pembuktian adanya proses perpanjangan konsesi PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT) yang dilakukan oleh PT Pelindo II dengan Hutchinson Port Holding (HPH) telah menyalahi aturan. Apalagi terungkap adanya indikasi *conflict of interest* dan manipulasi yang dilakukan oleh Deutsche Bank dalam melakukan evaluasi selaku konsultan dan dalam memberikan pinjaman sindikasi bank luar negeri selaku kreditur. Sehingga, mengorbankan RJ Lino sebagai pion dalam permainan catur tingkat tinggi, merupakan hal yang tak terelakkan.

Tapi menggusur Rini Sumarno? Nah ini jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan banyak kalangan. Dalam analisis saya, memang benar ada benturan kepentingan antara Presiden Jokowi versus Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tapi kerap kita mengabaikan satu fakta penting, bahwa meskipun ada benturan antara Presiden Jokowi dan Wapres JK, namun ikatan kepentingan antara Megawati (baca:

Menteri BUMN Rini Soemarno berjalan sebelum mengikuti rapat dengan Pansus Pelindo II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (4/12).



Teuku Umar) dan Wapres JK, sejatinya tetap dalam satu skema kepentingan bersama.

Dalam polarisasi antara Jokowi versus JK, Menteri ESDM Sudirman Said dan Rini Sumarno memang kerap dibaca sebagai satelit-satelit politik kepentingan Wapres JK. Namun jika diurai secara lebih mendalam, kedua menteri tersebut hakikatnya punya peran strategis yang berbeda. Koneksi Sudirman Said dengan Ari Sumarno yang kakak kandung Rini, memang terlihat ketika mantan aktivis Masyarakat Transparansi Internasional itu menjabat Corporate Secretary Pertamina di era Ari Sumarno jadi Dirut.

Tapi kedekatan Sudirman Said dengan Kuntoro Mangkusubroto yang orang dekat mantan Presiden SBY dan mantan Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita, pada perkembangannya justru jauh lebih solid ikatan politiknya ketimbang kedekatannya dengan Ari Sumarno dan tentunya Menteri Negara BUMN Rini Sumarno.



Dalam perang kepentingan antar kongsi bisnis di internal istana, Sudirman Said harus dibaca sebagai orang yang bekerja untuk kongsi bisnis Ginandjar Kartasasmita dan Kuntoro Mangkusubroto yang saat ini sudah memasang “sekrup-sekrup” pentingnya di istana melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan sampai tingkat tertentu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Lalu dimana peran Rini Sumarno dalam “perang senyap” antar para pemain tingkat tinggi di lingkaran dalam kekuasaan Jokowi-JK? Masih ingat pidato Megawati di depan Rakernas PDIP di Bali beberapa waktu lalu? Dalam pidato itu, Megawati menuding adanya koalisi antara kekuatan-kekuatan anti partai dan kekuatan modal. Khususnya yang bermain di sektor energi dan migas. Nah, di sinilah konteks dari yang saya ulas ini.

Tak pelak pidato Mega tersebut dialamatkan kepada mata-rantai dari Kongsi the Ginandjar Boys yang dalam permainan ini, Sudirman Said

merupakan “pemain garis depan” yang dalam lingkaran dalam kekuasaan Jokowi-JK, alumni Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) ini bertumpu pada Wapres JK. Berarti, Sudirman Said merupakan tim solid dari kongsi bisnis antara Ginandjar Kartasasmita dan Wapres JK.

Rini Sumarno, sejak pembentukan kabinet Jokowi-JK di awal pemerintahan Oktober 2014 lalu, secara resmi memang menyebrang ke kubu Wapres JK. Namun yang tetap harus kita ingat, sejak era pemerintahan Presiden Megawati periode 2001-2004, meski resminya waktu itu Rini merupakan Menteri Perdagangan, sejatinya Rini merupakan “Pemain Samping Serba Guna” Presiden Megawati. Maka, Rini oleh karena perannya itu, seringkali menjalankan aneka ragam misi yang harus dimainkan atas arahan Presiden Megawati baik secara terbuka maupun yang bersifat tertutup.

Berarti, betapapun sekarang Rini berada dalam orbit kepentingan politik Wapres JK, namun dalam analisis intelijen, Rini tetap merupakan orang yang bekerja untuk Megawati meskipun resminya merupakan orang dekat Wapres JK dan Menteri ESDM Sudirman Said. Tapi jangan lupa. Rini itu gimana pun juga, merupakan pemain kunci dalam ikut menyusun formasi kabinet dalam kapasitasnya sebagai Kepala Staf Tim Transisi Pemerintahan Jokowi-JK. Jadi peran mantan Dirut Astra International ini memang strategis juga. Sehingga tidak semudah itu menyingkirkan Rini jika tidak ada kesepahaman antara Wapres JK dengan “Ibu Suri” Megawati. Karena karakteristiknya sebagai “pemain samping serba guna” Megawati dari dulu hingga kini, maka merapatnya Rini ke kubu Wapres JK, harus dibaca sebagai “Sabuk Pengaman” tetap terjalannya kerjasama politik antara Wapres JK dan “Ibu Suri” Megawati. Sehingga dalam skema kepentingan strategis Kongsi Bisnis Ginandjar Kartasasmita, Kuntoro Mangkusubroto yang punya agenda strategis menguasai tata kelola energi dan Migas melalui pionnya yaitu Sudirman Said, Rini tetap dipandang sebagai “kawan taktis” dan bukan “sekutu strategis.” Rini tetap dipandang punya nilai strategis, sejauh bisa memainkan fungsi sebagai “pemain perantara” yang tersamar untuk mengkomunikasikan agenda-agenda strategis kongsi bisnis Ginandjar dan JK kepada Megawati dan kubu Teuku Umar pada umumnya.

Dan celakanya, peran khusus ini memang khas Rini, dan sejauh yang saya tahu, hanya mantan Dirut Astra Internasional inilah yang dirasa *sreg* oleh Mega untuk memainkan misi-

misi khusus tersebut. Dengan begitu, hasil Pansus Pelindo II yang mendesak Jokowi untuk mencopot Rini, sepertinya tidak semudah yang dibayangkan. Kecuali, jika Mega dan JK sepakat bahwa peran khusus ala Rini sebagai “Pemain Samping Serba Guna” ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Tapi benarkah kedua orang yang sejatinya mengendalikan pemerintahan Jokowi ini memang sudah pada kesepahaman seperti itu? Saya kok masih ragu.

Karena kalau muaranya nanti adalah *win-win solution* antara kubu Ginandjar-JK-Sudirman Said dan kubu Megawati-Teuku Umar, bisa dipastikan peran Rini justru akan tetap dipertahankan. Apalagi dalam pergulatan dalam perumusan kebijakan-kebijakan strategis bidang Migas dan Energi, kongsi bisnis ini tidak saja berupaya mengamankan kepentingannya di pemerintahan/eksekutif, melainkan juga di legislatif.

Perang skema kepentingan dalam sektor minerba, khususnya dalam revisi UU No 4/2009 tentang Minerba, kongsi ini sangat berkepentingan untuk menggusur Setya Novanto sebagai Ketua DPR-RI, karena mereka sadar sepenuhnya bahwa Setya Novanto dan kroni-kroni bisnisnya pasti akan ikut campur dan memaksa diikutsertakan dalam kongsi bisnis kubu Ginandjar-JK cs. Makanya, hasil Sidang MKD yang akhirnya berhasil memaksa Setya Novanto mundur, harus dibaca sebagai kemenangan Kongsi Ginandjar-JK-Sudirman Said.

Lantas, kalau Rini sejatinya bukan merupakan tim solid Kongsi Ginandjar-JK-Sudirman, adakah jejak-jejak Cendana yang punya temali dengan Rini? Mari kita buka kembali tumpukan berita lama. Ketika menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian dalam pemerintahan Megawati, Rini pernah memberikan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada tiga pengusaha non-pribumi The Nin King, Sjamsul Nursalim dan Bob Hassan. Sekadar informasi, ketiganya merupakan kroni Cendana.

Ketika masih di era pemerintahan Suharto, ketika Fuad Bawazir terpilih sebagai Presiden Direktur PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada 1995, Rini bersama dengan Titik Suharto, duduk sebagai Dewan Komisaris. Tidak sampai di situ saja kedekatan jaringan Cendana ini. Fuad, Rini dan Titik bersama-sama dengan Bob Hasan dan Mar’ie Muhammad mendirikan Capital Market Society (CMS).

Maka tidak heran ketika Fuad terpilih sebagai Menteri Keuangan di masa-masa akhir pemerintahan Suharto, Rini direkrut sebagai Staf Ahli Departemen Keuangan dan Wakil

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) berbincang dengan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri (tengah) dan Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) usai acara Simposium Kebangsaan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/12).



Ketua BPPN. Ketika Suharto lengser dan Fuad tidak lagi jadi Menteri Keuangan, maka Rini pun keluar dari BPPN dan kembali ke Astra International.

Nah, ngomong-ngomong soal Astra, ada cerita menarik. Masih ingat kan ketika Bank Summa milik William Suryajaya akhirnya kolaps gara-gara kalah kliring? Menurut beberapa informasi, hal ini sedikit banyak gara-gara Rini juga.

Kalau buka kembali tumpukan berita-berita lama, kolapsnya Bank Summa bermula ketika Edward, putra William Suryajaya, main valas, sehingga terbelit kesulitan keuangan. Sebenarnya hal seperti ini sudah sering terjadi. Dan biasanya, kalau mengalami kejadian serupa, pihak Astra ditalangi dulu oleh *cash flow* Astra sebelum terjadi kalah kliring, dengan status pinjaman jangka pendek.

Namun kali ini, Rini yang waktu itu menjabat Direktur Keuangan Astra, menolak memberi persetujuan untuk pencairan dana talangan. Akibatnya, Bank Summa kalah kliring, dan terpaksa bubar.

Apa motivasinya Rini memang belum terang benar, tapi yang jelas, gara-gara kolapsnya Bank Summa, kemudian berdampak pada kredibilitas



Astra dan terutama sang pemilik utama, yaitu William Suryajaya. Sehingga muncul desakan dari berbagai kalangan, agar mayoritas saham Astra milik William dijual kepada pihak lain, agar citra dan kredibilitas Astra tetap terjaga.

Sehingga berkembang dugaan bahwa kebijakan Rini yang menolak persetujuan pengeluaran dana talangan buat Summa, merupakan bagian integral dari skenario Kroni Cendana untuk melakukan pengambil-alihan terhadap Astra dari tangan William melalui “cara-cara kotor.”

Apalagi indikasi adanya *hostile take over* terhadap Astra ini semakin diperkuat oleh alm Sumitro Joyohadikusumo dalam biografinya, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang. Sumitro, ekonom kondang dan ayah kandung Prabowo Subia yang akrab dipanggil “Pak Cum” ini sempat menjabat Presiden Komisaris Astra International di saat-saat kritis peralihan kepemilikan Astra itu. Menurut penuturan Pak Cum, waktu itu Yayasan Prasetya Mulya yang sebenarnya merupakan kedok dari sebuah konglomerasi para pengusaha Cina yang dipimpin Liem Soe Liong Cs, sangat berkeinginan untuk membeli saham Astra. Hanya saja, Sumitro yang pada dasarnya tidak

setuju dengan ide itu, sempat mengingatkan William agar dalam proses penjualan saham Astra, harus atas sepengetahuan dan persetujuan dirinya selaku Presiden Direktur Astra. Sayangnya, entah alasan apa, William tidak mengindahkan saran Sumitro. Sehingga terjadilah pembelian saham Astra milik William lewat “pintu belakang.”

Entah masih dalam skema Yayasan Prasetya Mulya atau tidak, yang jelas kemudian keluarga Cendana melalui Bob Hasan, menguasai saham mayoritas Astra.

Namun, jejak-jejak Cendana dalam kiprah Rini tersebut, memang tetap menyisakan tanda-tanya, untuk siapa sesungguhnya dia bermain? Mengingat bakat khususnya sebagai pelobi ulung dan pemain penghubung (arranger), telah mengkondisikan dirinya sebagai “pemain samping serba guna” bagi banyak kepentingan maupun para pemain kunci di negeri ini.

Di kalangan pemain kunci kemiliteran, jejak-jejak Cendana dalam kiprah Rini terungkap melalui kedekatannya dengan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (purn) Hendropriyono dan mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Endriartono Sutarto. Keduanya, tak diragukan lagi merupakan jenderal-jenderal yang sangat dekat dengan Cendana. Bahkan di detik-detik terakhir lengsernya Suharto, Endriartono menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Suharto. Yang kemudian di era reformasi, karir militernya melesat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan akhirnya Panglima TNI.

Bedanya, kalau Endriartono hingga detik terakhir kejatuhan Suharto tetap setia di kubu Cendana, Hendro termasuk dalam jajaran 14 menteri yang dimotori oleh Ginandjar Kartasasmita untuk ikut mengundurkan diri dari kabinet Suharto. Dan sejak saat itu, Hendro merapat sepenuhnya ke kubu Megawati dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Apa yang mendasari kedekatan Rini dengan kedua jenderal yang hingga kini masih sangat diperhitungkan pengaruhnya itu, memang hanya Rini yang dan mereka berdua yang tahu. Namun kenyataan ini mengindikasikan bahwa ada banyak orang-orang kuat yang melindungi dan memfasilitasi sepak-terjang Rini di jagad politik Indonesia.

Nah, apakah hasil pansus Pelindo II akan berhasil mendesak Presiden Jokowi untuk mengusir Rini Sang Pemain Samping Serba Guna? Kita lihat saja nanti. ♦ Hendrajit

Pembelian Tanah RS Sumber Waras Menyimpang

Dana sejumlah Rp 755.689.550.000 sudah digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membeli tanah seluas 36.410 meter persegi milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW). Nantinya, tanah yang terletak di Jalan Kyai Tapa 1, Tomang, Grogol, Jakarta Barat itu menurut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan dijadikan RS Khusus Jantung dan Kanker, rencana yang juga diinginkan oleh istrinya Victoria Tan.

Namun siapa sangka, pembelian tanah yang di atasnya berdiri bangunan RS Sumber Waras (RS SW) itu ternyata menimbulkan indikasi merugikan keuangan Negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui hasil audit investigasinya khusus untuk pembelian tanah RS SW menyimpulkan adanya enam penyimpangan, mulai dari tahap perencanaan, pembentukan harga hingga penyerahan hasil. Gejala adanya kerugian Negara akibat pembelian tanah milik RS SW pun sudah dituangkan lebih dulu dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Pemprov DKI. Khusus untuk kasus RS SW ini, lembaga pimpinan Harry Azhar Azis menduga jika Ahok dan bawahannya sudah merugikan Negara sebesar Rp 191.334.550.000.

“(Pengadaan tanah RS SW) terdapat enam penyimpangan. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pembentukan tim pengadaan pembelian lahan RS SW, pembentukan harga dan penyerahan hasil,” papar anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi, saat jumpa pers penyerahan hasil audit pembelian

tanah YKSW, di gedung KPK, Jakarta, Senin 7 Desember 2015.

Dalam menelusuri enam penyimpangan akibat pembelian tanah YKSW, BPK pun menyerahkan hasil auditnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti rasuah sendiri menegaskan bahwa hasil audit BPK akan dijadikan dasar untuk meningkatkan status kasus pembelian tanah YKSW dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Artinya, akan ada pihak yang dijadikan tersangka oleh KPK.

“Yang pasti saat ini tahapan yang sedang dilakukan adalah pengumpulan bahan dan keterangan di tingkat penyelidikan. Hasil audit BPK tersebut merupakan salah satu data atau bahan saja dalam proses penyelidikan ini,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP saat berkomentar mengenai penanganan kasus pembelian tanah YKSW, di kantornya, Selasa 8 Desember 2015.

Pada 17 Juni 2014, BPK resmi merilis LHP terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2014, yang di dalamnya tertuang 38 temuan. Khusus untuk temuan dugaan kerugian Negara akibat pembelian tanah YKSW termaktub di nomor 30. Dalam LHP-nya BPK menyebut, Bendahara Umum Daerah Pemprov DKI telah mentransfer dana ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan sebesar Rp 800.000.000.000, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bernomor 00143332014.

Dengan adanya transfer tersebut, yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Kesehatan Pemprov DKI,



Dien Emmawati, sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Ahok sendiri. Selanjutnya, melalui cek nomor 493387 pada 30 Desember 2014, pembelian tanah YKSW resmi terealisasi, dan kemudian dicairkan oleh YKSW sehari berselang dengan memperhitungkan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5 persen yakni Rp 37.784.477.500.

Hal menarik yang patut kita telusuri adalah alasan Ahok membeli tanah tersebut. Padahal tanah tersebut sudah bermasalah sejak puluhan tahun silam. Bukan hanya soal status kepemilikan, YKSW juga diketahui bermasalah dalam pembayaran pajak. Bayangkan saja, YKSW menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) selama delapan tahun, 1994-1999 dan 2013-2014. Total tunggakan pajak



PBB P2 YKSW adalah sejumlah Rp 10.603.718.309. Apakah ini juga menjadi pertimbangan Ahok sebelum membeli tanah YKSW?

Selain itu, yang menjadi permasalahan dalam pembelian tanah YKSW adalah status sertifikat tanah. Selama ini tanah yang di atasnya berdiri RS Sumber Waras memiliki status Hak Guna Bangunan (HGB), yang artinya yayasan tersebut tengah menyewa tanah milik Negara. YKSW sendiri menyewa tanah tersebut hingga 2018, setelah kontrak habis tanah tersebut pun kembali milik Negara, kecuali YKSW memperpanjang masa sewanya.

Lalu, mengapa Ahok tidak menunggu hingga 2018, tanpa mengeluarkan sepeser pun uang rakyat? Dan, bagaimana bisa negara membeli tanahnya sendiri? Hal itu juga salah satu masalah yang difokuskan oleh BPK dalam audit investigasi-nya. “Menyimpang itu satu siklus, proses awal (status tanah) sampai akhir pengadaan lahan,” terang Eddy Mulyadi, di gedung KPK, 7 Desember 2015.

Namun, bukan Ahok namanya jika tidak berdalih. Khusus soal status sewa dia punya alasan sendiri yang mungkin hanya relevan menurutnya.

Awalnya menurut LHP BPK, yang berkeinginan untuk membeli tanah yang di YKSW bukanlah Pemprov DKI, melainkan PT Ciputra Karya Utama (CKU). Perusahaan yang diketahui milik Ir. Ciputra itu menjadi penawar pertama tanah milik YKSW dengan harga per meternya sekitar Rp 15.000.000, dan bertujuan mengalihfungsikannya menjadi lahan komersial.



Foto atas: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain (kanan) memberikan keterangan pers tentang hasil audit investigasi terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras didampingi Anggota III BPK Eddy Mulyadi Supardi (kiri), dan Anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara (kedua kiri) di Gedung KPK, Jakarta, Senin (7/12).

Foto bawah: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjalan menuju Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (23/11).

Penawaran itu menurut Ahok hanya bisa dibatalkan dengan menawarkan harga yang lebih tinggi. Alhasil Pemprov DKI dan YKSW sepakat dengan harga permeternya sebesar Rp 20.755.000. Bekas politikus partai Gerindra itu juga berdalih daripada dijadikan lahan komersial, lebih baik dibeli Pemprov untuk membangun RS Khusus Jantung dan Kanker, sebagaimana impian Victoria Tan.

Hingga kemudian dilakukanlah perjanjian jual-beli antara Pemprov DKI dengan YKSW, yang dimuat dalam Surat Direktur Umum dan SDM RS SW kepada Plt. Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama bernomor 133/Dir/D/K/VI/2014 pada 27 Juni 2014, perihal penjualan tanah RS SW. Dalam surat itu juga menyebut sebagai tindak lanjut dari pertemuan Direktur Umum dan SDM RS SW dengan Plt Gubernur DKI pada 6 Juni 2014, dan kesediaan menjual tanah seluas 36.410 meter persegi.

“Dengan harga senilai Rp 20.755.000 per meter persegi sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah di Jl. Kyai Tapa tahun 2014,” bunyi laporan LHP BPK.

Jauhnya perbedaan NJOP itu juga menimbulkan permasalahan yang tak kalah peliknya. Hal tersebut menjadi dasar mengapa BPK mamatok indikasi kerugian Negara akibat pembelian tanah YKSW sebesar Rp 191.334.550.000.

“Senilai Rp20.755.000/m2 atau senilai Rp755.689.550.000,” bunyi laporan LHP BPK. Dari fakta itu BPK menyimpulkan terdapat selisih harga senilai Rp 191.334.550.000. Rinciannya Rp755.689.550.000-Rp564.355.000.000.

Sekelumit Sejarah RS Sumber Waras

Pengelolaan RS Sumber Waras selama ini berada di tangan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) yang saat ini dipimpin Kartini Muljadi, wanita terkaya di Indonesia versi majalah Forbes pada 2014 silam. YKSW sebelumnya bernama Yayasan Kesehatan Candra Naya, yang tak lain adalah anak yayasan



dari Perhimpunan Sosial Candra Naya (PSCN), sebuah organisasi yang sebagian anggotanya juga terafiliasi dengan Badan Pemujawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki).

Secara garis organisasi, pada mulanya YKSW berada di bawah naungan PSCN. Namun pada 1966, YKSW memisahkan diri. Kala itu yayasan yang memang fokus terhadap aspek kesehatan ini dipimpin oleh Padmo Soemasto dengan Sekretaris Liem Tjing Hien alias Djojo Muljadi (suami Kartini Muljadi). Dengan pemisahan tersebut, aset-aset yang awalnya dimiliki sepenuhnya oleh PSCN juga mengalami perubahan.

Pasca pemisahan YKSW, pendiri PSCN, Khaw Woen Sioe kemudian memecah kepemilikan tanah PSCN menjadi dua sertifikat. Dimana separuh tanah atas nama YKCN dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) dan separuh lagi atas nama PSCN, dalam bentuk sertifikat Hak Milik (HM). Tanah dengan sertifikat HGB itulah yang dibeli Pemprov DKI Jakarta seharga Rp 755.689.550.000.

Seiring perkembangan waktu, mengenai kepemilikan tanah PSCN dan YKSW pun bermasalah. Berawal dari rencana Padmo yang ingin menghibahkan tanah PSCN kepada YKSW, tuding-menuding antara dua organisasi itu akhirnya masuk ke meja hijau. Ketua PSCN setelah Padmo, I Wayan Suparmin, dijabarkan ke jeruji besi oleh Kartini, lantaran dituding melakukan penggelapan surat tanah milik PSCN.

Sengketa kepemilikan satu bidang tanah milik PSCN dimulai pada 1970. Ketika itu, Padmo sebagai Ketua PSCN menghibahkan tanah milik PSCN kepada YKSW, dengan proses dibawah tangan. Atas hibah tersebut, kemudian pada 1993 Kartini menggunakan dua sertifikat tanah milik PSCN dan YKSW untuk meminjam uang sekitar Rp 5.450.000.000 PT Liman International Bank (Bank Liman). Ditengah proses pengembalian dana pinjaman itu, pada 1996 Padmo dan Kartini kembali melakukan hibah ulang atas tanah bersertifikat HM milik PSCN.

Namun demikian, dua tahun berselang Padmo secara sepihak membatalkan hibah tanah milik PSCN. Siapa sangka pembatalan itu terjadi? Anggota PSCN-lah yang memaksa Padmo untuk melakukan pembatalan hibah. Pasalnya, ketika pemilihan Padmo sebagai ketua PSCN juga dilakukan secara sepihak, tanpa persetujuan anggota PSCN lainnya.

Setelah proses peminjaman itu selesai, Bank Liman kemudian mengembalikan dua sertifikat yang dijaminkan oleh Kartini. Sertifikat tanah PSCN dikembalikan kepada I Wayan, sedangkan sertifikat YKSW dikembalikan kepada Kartini. Pengembalian sertifikat tanah PSCN kepada I Wayan dilakukan Bank Liman, lantaran saat permintaan pinjaman sertifikat tersebut masih atas nama PSCN.

Kendati demikian, pengembalian sertifikat ke I Wayan dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Kartini, yang akhirnya berbuah kepada pelaporan I Wayan atas penggelapan sertifikat. Hal itu dirasa janggal karena pada dasarnya tanah tersebut masih milik PSCN. Upaya menjebloskan I Wayan ke penjara seakan menunjukkan bagaimana semangat Kartika yang ingin menguasai aset-aset milik PSCN.

Patut diduga, mulai dari upaya hibah hingga kriminalisasi terhadap I Wayan berkaitan erat keinginan Kartini untuk menguasai aset PSCN yang berujung dengan pembelian tanah RS SW kepada Pemprov DKI.

Nebby Mahbubirrahman - Mochammad Zaky Kusumo

aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA

Menyajikan informasi terhangat dan terpercaya,
disampaikan secara cepat, tepat, benar,
serta makin progresif!



INFO & PEMASARAN

 **Dedy 081 20 53 8776**
Ranie 081 38 210 44 69
Rhiza 081 828 0941 009

 **marketing@aktual.com**
iklan@aktual.com



Catatan Kinerja Polri Selama 2015

Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) merilis laporan akhir tahun kinerja Polri selama 2015. Salah satu faktor utama yang menjadi sorotan adalah pasca polemik penetapan tersangka calon Kapolri Komjen Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat soliditas Polri terganggu.

“Kopolnas berpendapat sejak awal tahun, atas pentersangkaan Komjen Budi Gunawan oleh KPK maka Polri praktis terbelah, soliditas terganggu,” ujar komisioner Kopolnas, Adrianus Meliala di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (23/12).

Adrianus menuturkan, penciptaan kembali soliditas itulah yang menjadi salah satu program yang ditawarkan calon Kapolri saat itu, yakni Jenderal Polisi Badrodin Haiti yang kini telah menjadi menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

“Saat wawancara dengan Kopolnas, Pak Badrodin menawarkan penciptaan kembali soliditas. Penilaian kami, dapat dikatakan minimal di tingkat permukaan, soliditas itu kini telah berhasil kembali,” ungkap Adrianus.

Lebih lanjut, penilaian Kopolnas atas kinerja Polri di

bidang pemeliharaan keamanan dalam negeri yang paling menonjol tahun 2015 ini ialah keberhasilan pengamanan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 lalu.

Termasuk diantaranya, pencegahan dan pengungkapan aksi teror dianggap Kopolnas sesuai sesuatu yang berhasil dan patut diapresiasi.

“Kopolnas juga mengapresiasi keberanian Kapolri mengeluarkan surat edaran tentang penanganan ujaran kebencian atau Hate Speech. Dimana inisiatifnya berasal dari Kopolnas,” tambah Adrianus.

Kemudian terkait kinerja Polri di bidang perlindungan, pengayom dan pelayan yang menonjol dan patut diacungi jempol, menurut Kopolnas yakni peran Bhabinkamtibnas yang mulai terlihat.

Investasi Polri berupa penempatan satu personel Bhabinkamtibnas di satu desa, meski belum sepenuhnya terpenuhi dan dengan pemberian tunjangan Rp 1,1 juta mulai terlihat kinerjanya, Babinkamtibnas mampu mendeteksi dan mencegah permasalahan sosial atau kejahatan besar. “Semoga polri tetap serius dengan program ini hingga pada waktunya,” tutupnya.

/Karel Stefanus Ratulangi

KPK Tetapkan Choel Mallarangeng Tersangka Kasus Hambalang



KPK menetapkan adik bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Andi Zulkarnaen Mallarangeng sebagai tersangka proyek pembangunan atau pengadaan atau peningkatan sarana prasarana Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P2SON) di Hambalang 2010-2012.

“Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan atau pengadaan atau peningkatan sarana prasarana pusat pendidikan dan sekolah olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010-2012 penyidik KPK menemukan dua alat bukti yang cukup AZM (Andi Zulkarnain Mallarangeng) swasta sebagai tersangka,” kata Pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Senin (21/12).

Dalam dakwaan Andi Mallarangeng, Choel disebut sebagai perantara pemberian uang 550 ribu dolar AS kepada Andi dari mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Kemempora Deddy Kusdinar.

Uang itu dalam dakwaan disebut diberikan secara bertahap yaitu Rp2 miliar diterima oleh Choel Mallarangeng di kantornya dari PT Global Daya Manunggal, Rp1,5 miliar diterima oleh Choel Mallarangeng dari PT Global Daya Manunggal melalui mantan

Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam dan Rp500 juta diterima Choel Mallarangeng dari PT Global Daya Manunggal melalui Mohammad Fakhruddin.

PT Global Daya Manunggal adalah salah satu perusahaan subkontraktor yang mengerjakan proyek Hambalang sedangkan M Fakhruddin adalah staf khusus Andi Mallarangeng. Uang itu digunakan untuk keperluan operasional Menpora, pembayaran tunjangan hari raya untuk protokoler Menpora, pembantu dan pengawal di rumah dinas menpora dan rumah kediaman Andi serta akomodasi dan pembelian tiket pertandingan sepak bola piala AFF di Senayan dan Malaysia serta pertandingan tim Manchester United untuk rombongan Menpora serta anggota Komisi X DPR.

“Tersangka AZM diduga melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait pembangunan atau pengadaan atau peningkatan sarana prasarana pusat pendidikan dan sekolah olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010-2012,” tambah Yuyuk.

Atas perbuatannya Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel Mallarangeng disangkakan melanggar pasal 2 atau pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Dalam pemeriksaan 4 Maret 2013 lalu, Choel mengaku sudah mengembalikan uang 550 ribu dolar AS tersebut.

Perkara ini merupakan pengembangan korupsi pembangunan proyek P2SON Hambalang sebelumnya yang sudah menjerat mantan Menpora Andi Mallarangeng selaku Pengguna Anggaran, mantan Kabiro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen saat proyek Hambalang dilaksanakan dan mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. /Wisnu

Kasus RJ Lino di Bareskrim Tetap Jalan



Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim mengaku tak mempersoalkan penetapan tersangka Dirut Pelindo II RJ Lino oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlebih, kasus yang ditangani Bareskrim tetap jalan terus.

Pasalnya, perkara yang ditangani di KPK berbeda dengan kasus di Mabes Polri. “Tidak ada masalah. Kita tetap jalan terus. Kan di Mabes Polri yang ditangani kasus *mobile crane* 2014 sedangkan di KPK kasus pengadaan Quay Container Crane (QCC) tahun 2010,” kata Wadir Pidsus Kombes Agung Setya di Mabes Polri Jumat (18/12).

Menurut Agung, Kabareskrim Komjen Anang Iskandar sebelumnya telah bertemu dengan pimpinan KPK untuk berkoordinasi terkait penanganan kasus di Pelindo II yang beda obyek penanganannya itu.

“Kemarin Pak Kabareskrim juga sempat bertemu dengan KPK soal ini. Nantipun, kalau misalnya, Lino ditahan KPK kita bisa periksa sambil di bon. Jadi tak masalah. Kini kita menunggu perhitungan kerugian negara dari BPK dalam kasus ini,” ujar dia.

Anang memang diketahui pernah ke KPK pada 5 November lalu. Saat itu Anang mengatakan kedatangannya dalam rangka

koordinasi dan sinergitas penyidikan yang dilakukan Bareskrim dengan KPK khusus dalam penanganan kasus Pelindo II. Anang saat itu kepada media menjelaskan Bareskrim dan KPK saling bertukar informasi terkait proses penanganan kasus dugaan korupsi di Pelindo II.

Diketahui, Bareskrim Polri telah menggandeng BPK untuk menyelidiki dugaan korupsi pengadaan *mobile crane* 2014 di PT Pelindo II. Lino telah diperiksa Bareskrim sebanyak tiga kali sebagai saksi dalam kasus ini. Lino juga berpotensi terseret dalam kasus ini. Polisi sebelumnya telah menyatakan Lino patut diduga masuk sebagai bagian dari korupsi di Pelindo II.

Namun belum jelas apakah Lino diduga ikut sebagai pelaku penyertaan dan bersama-sama dengan Direktur Teknik PT Pelindo II Ferialdi Noerlan (FN) yang telah jadi tersangka dalam kasus ini, ataukah berdiri sendiri dengan kejahatan yang baru.

Selain Lino tak kurang ada sekitar 50 saksi dan saksi ahli yang telah diperiksa dalam kasus yang sampai membuat DPR membentuk panitia khusus (pansus) itu. Hasil Pansus DPR adalah merekomendasikan agar Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino dipecat dari jabatannya. /Wisnu

Evaluasi Kinerja 2015 Tak Sesuai Harapan, SKK Migas Berharap 2016 Lebih Baik Lagi

Energi merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional, terlebih di era modern saat ini. Hampir setiap aktifitas kehidupan membutuhkan energi. Tak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika Indonesia mengalami krisis energi.

Seperti misalnya krisis listrik, maka akan mengakibatkan kelumpuhan semua sektor bisnis dan industri. Ataupun betapa buruknya kondisi transportasi Indonesia, jika suatu saat cadangan minyak dan gas bumi kita habis, sementara kita tidak bisa lagi untuk mengimpor minyak dan gas.

Pentingnya peranan energi yang meliputi hampir seluruh aktifitas masyarakat, menjadikannya sebagai sektor penggerak perekonomian untuk pembangunan negara. Karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa energi merupakan salah satu pilar ketahanan nasional.

Olah karenanya energi adalah kepentingan umum, maka pemerintah harus mengelola energi dengan baik dan memperhatikan berbagai aspek demi terpenuhi mandat UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Adapun sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam sektor pembagian pengelolaan energi terbagi menjadi empat bagian yakni Minyak dan Gas Bumi, Mineral dan Batubara, Ketenagalistrikan, serta Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memberi catatan, sepanjang tahun 2015 ini



(Foto kiri) Elan Biantoro

(Foto kanan) Petugas memeriksa fasilitas produksi energi panas bumi di sumur produksi Cluster D PT. Pertamina Geothermal Energy Area Ulubelu, Lampung, Senin (14/12).

pada sektor Migas, pemerintah masih belum mampu menyediakan infrastruktur yang memadai sebagai sarana memfasilitasi peningkatan penyerapan domestik.

"Kita bisa lihat dalam hal gas bumi, sebenarnya Indonesia punya produksi yang berlimpah untuk memenuhi kebutuhan memasak bagi rumah tangga, bahan bakar industri, transportasi, bahkan pembangkit listrik," ujar Kepala Bagian Humas SKK Migas, Elan Biantoro di Cirebon beberapa hari yang lalu.

Namun kata Elan amat disayangkan, karena minimnya serapan domestik terhadap gas bumi Indonesia. "Minimnya serapan ini bukan disebabkan rendahnya permintaan, namun hal ini lantaran tidak ada infrastruktur jaringan pipa gas sehingga menghambat suplai."

Kemudian lanjutnya rendahnya



tingkat serapan domestik gas bumi Indonesia dan berlimpahnya jumlah produksi, mengharuskan pemerintah mengekspor gas ke luar negeri. Di saat bersamaan program konversi minyak tanah ke LPG, menuntut pemerintah untuk mengimpor LPJ dan mengucurkan dana subsidi yang kian terus membengkak. Padahal sesungguhnya peranan kegunaan LPG tersebut bisa digantikan oleh gas bumi Indonesia yang masih berlimpah.

Elan menyebutkan masih banyak hal yang belum tercapai pada target APBN-P 2015 di sektor hulu migas, yakni sebagai berikut:

Target *lifting* sebanyak 825.000 barel per hari, namun pencapaiannya hanya pada angka 778.680 barel per hari atau 94,4% dari target. Begitupun target *lifting* gas 7.079,00



direncanakan 34.060 kegiatan namun hanya tercapai 29.492 kegiatan atau 87% kegiatan.

Banyaknya target yang tidak tercapai pada sektor hulu migas di tahun 2015 kata Elan diantaranya disebabkan kegiatan *onstream* yang mundur, kendala pengadaan, kendala pembebasan lahan dan perijinan serta kendala subsurface.

Selain itu kata Elan ada juga kendala pada proses operasional, pengelolaan wilayah kerja (WK) terkait perpanjangan WK, penyerapan buyer lebih rendah, *unplanned shutdown/planned shutdown*, serta *decline rate* yang tajam.

“Untuk merealisasikan pencapaian target dalam APBN 2016 mendatang, pada sektor hulu migas perlu diantisipasi berbagai masalah proses operasional sehingga tidak mengulangi kesalahan sama yang pernah dilakukan pada 2015 ini,” tambahnya.

Adapun hal lain yang harus diupayakan kata dia yakni mengurangi terjadinya *planned shutdown*, mengatasi *decline rate* yang tajam dengan menambah sumur pengembang, melakukan optimalisasi *work over* dan *well service*, mengatasi kendala *subsurface*, mengatasi kendala pembebasan lahan dan perijinan serta memberi kepastian pengelolaan wilayah kerja.

“Pengelolaan sektor energi harus menjadi perhatian serius dari pemerintah untuk menggerakkan perekonomian dan pembangunan negara yang lebih maju,” ucapnya.

Pemerintah harus melihat efektifitas dan efisiensi serta berkelanjutan dalam melakukan eksploitasi, untuk itu mestinya pemerintah memenuhi segala infrastruktur yang menunjang eksplorasi.

“Namun apapun hasil pada tahun ini harusnya dijadikan landasan bagi pemerintah untuk evaluasi dan melakukan komitmen pembenahan dari berbagai kendala yang ada,” pungkasnya. • Dadang Sah-Arbie Marwan

BBTU per hari, realisasinya hanya mencapai 6.921,13 BBTU per hari atau 97,8% dari target.

1. Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesia Crude Price – ICP) yang ditetapkan sebesar USD60 per barel, akan tetapi pencapaian rata-ratanya hanya sebesar USD51,21 atau 85,4%.
2. *Cost Recovery* mencapai USD14,19 miliar atau 100,6% dari target USD14,10 miliar. Sedangkan bagi hasil milik pemerintah hanya mencapai USD12,81 miliar atau 85,0% dari target USD14,99 miliar.
3. Kegiatan survei dan pemboran per 11 Desember 2015, dari rencana survei seismik 43 kegiatan, hanya terealisasi 14 kegiatan atau hanya 30% dari rencana. Sedangkan survei non-seismik yang direncanakan 22 kegiatan, namun terealisasi 11 kali atau 41% kegiatan.
4. Pemboran eksplorasi yang direncanakan 157 sumur, akan tetapi yang terealisasi hanya 53 sumur atau 34% pemboran. Rencana program *re-entry* sumur sebanyak 27 kegiatan namun yang terlaksana hanya 11 kegiatan atau 40% kegiatan.
5. Pemboran sumur pengembangan ditargetkan 627 sumur namun terealisasi hanya 524 atau 84% sumur. Sedangkan program kerja ulang ditargetkan 1.354 kegiatan, realisasi 1.290 kegiatan atau 95% kegiatan.
6. Perawatan sumur

Belum Ada Produk Unggulan Siap Hadapi MEA



Pembeli memilih berbagai tas di toko kawasan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (29/12). Pemerintah terus berupaya menguatkan pengelolaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan meningkatkan wawasan pelaku usaha, daya saing guna membantu pelaku UKM menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sumatera Barat, Asnawi Bahar mengatakan belum ada produk unggulan daerah itu yang memiliki daya saing guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang mulai berlaku 31 Desember 2015.

“Dalam memasuki MEA perlu adanya produk-produk yang memang memiliki daya saing dengan kualitas standar internasional, namun hingga saat ini produk seperti itu belum ada di Sumbar,” katanya di Padang, Rabu (30/12).

Ia mengatakan produk yang dimiliki Sumbar hanya dapat bertahan di daerah sendiri seperti adanya rendang atau sanjai dan belum memiliki kemampuan bersaing di pasar internasional.

“Sumbar tidak memiliki produk massal seperti sayur-sayuran, produk-produk pertanian dalam memasuki MEA sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan tidak siap,” katanya.

Namun langkah yang dapat dilakukan oleh Sumbar saat ini hanyalah dengan mengolah produk bahan baku menjadi minimal barang setengah jadi sebelum di ekspor.

Ia menyampaikan dalam memasuki MEA, Kadin akan lebih banyak bergerak ke sektor ekspor produk dan mendorong agar banyak investasi untuk melakukan proses pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi tersebut.

“Komoditi ekspor Sumbar selama ini yang menjadi andalan ialah karet, sawit, gambir dan kulit manis.

Produk inilah yang nantinya perlu diolah agar lebih mampu bersaing dalam pasar internasional karena setiap negara memiliki standarnya masing-masing,” jelasnya.

Menurutnya, hal yang perlu dicemaskan pemerintah dan masyarakat Sumbar dalam menghadapi MEA bukanlah produk yang akan masuk ke daerah itu, melainkan kedatangan investor asing yang dapat meniru produk olahan asli daerah dan menyempurnakannya untuk dijadikan produk sendiri.

Dengan adanya kemungkinan terjadinya kondisi tersebut, maka pemerintah bertanggungjawab memberi kemudahan regulasi, pembebasan lahan serta memberikan informasi peluang-peluang usaha agar tercipta UMKM yang berdaya saing tinggi.

Sementara, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Zulkifli juga akan meningkatkan pengawasan produk dalam menghadapi MEA karena walaupun menciptakan pasar bebas, namun bukan berarti barang dapat beredar dengan bebas.

Ia mengatakan berbagai produk seperti kosmetik, obat maupun makanan harus terdaftar dahulu di BPOM sehingga setiap pengimpor yang ingin memasukkan barang ke Indonesia harus mendaftar dulu.

“Hal yang menjadi tantangan terkait peredaran produk di pasaran adalah masuknya produk-produk tersebut melalui pelabuhan ilegal,” ujarnya. //Ismed-Ant

Ada Gerak-gerak Muluskan Perpanjangan KK Freeport Lewat Revisi PP 77/2014



Pakar hukum tatanegara, Rifqinizam Karsayuda menegaskan; berdasarkan PP No 77 tahun 2014,

tidak ada celah bagi pemerintah untuk memperpanjang kontrak Freeport. Ia melihat pemerintah berupaya merevisi PP tersebut untuk memuluskan perpanjangan kontrak Freeport.

“Berdasarkan hukum yang ada, UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan, dan PP No 77 tahun 2014 tentang pengelolaan pertambangan, sesungguhnya tidak ada celah bagi Freeport untuk melakukan perpanjangan kontrak yang ketigakalinya,” tegas Rifqi saat menjadi pembicara diskusi di HIPMI Center-Menara Bidakara 2 Lantai 8, Pancoran Jakarta Selatan, Selasa (29/12).

Dalam penjelasannya, PP No 77 tahun 2014 mengatur perpanjangan kontrak hanya boleh dilakukan dua kali tanpa melalui lelang.

Jika Freeport masih berminat untuk melakukan eksploitasi dan ingin mendapatkan izin pertambangan, mekanismenya harus melalui lelang, dengan melalui proses lelang terbuka maka Freeport bersaing dengan badan hukum lainnya dan siapapun berpeluang untuk menjadi pemenang lelang.

Namun Rifqi mengamati, ada gerak-gerak pemerintah berupaya merevisi PP No 77 tahun 2014 untuk memuluskan perpanjangan kontrak Freeport.

“Saya mencurigai pemerintah akan merevisi PP tersebut untuk merubah dua hal, pertama untuk memungkinkan perpanjangan kontrak Freeport lebih dari dua kali, dan point kedua adalah waktu mengajukan perpanjangan bisa lebih dari dua tahun sebelum kontrak berakhir,” pungkasnya. //Arbie Marwan

Mendagri Bakal Bubarkan BP Batam



Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan Badan Pengusahaan (BP) Batam akan dibubarkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan investasi.

"Target kami, BP Batam dihapus pada Januari 2016. Kami sudah melakukan kajian bersama menteri terkait," kata Mendagri saat pidato pelantikan Nuryanto sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Riau di Gedung Daerah Tanjungpinang, Rabu (30/12).

BP Batam sebelumnya bernama Otorita Batam, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41/1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam. BP Batam dibentuk berdasarkan Perppu UU Nomor 1 Tahun 2000, tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Tjahjo mengatakan pembubaran BP Batam disebabkan berbagai permasalahan yang muncul selama ini, terutama terkait tumpang tindih kewenangan antara BP Batam dengan Pemkot Batam yang dapat menghambat investasi.

"Memperhatikan permasalahan yang terjadi selama ini, BP Batam harus dibubarkan. Tumpang tindih kewenangan antara BP Batam dengan Pemkot Tanjungpinang menghambat pembangunan dan investasi," ujarnya.

Dia menjelaskan pembubaran BP Batam akan dilaksanakan cepat, namun tidak menunggu undang-undang diubah. Hal itu disebabkan waktu yang dibutuhkan untuk

mengubah ketentuan itu cukup lama.

"Revisi peraturan tentang BP Batam tetap dilaksanakan, tetapi kami akan fokus membuat peraturan baru sebagai payung hukum," ujarnya.

Pemerintah pusat berencana menetapkan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, seperti delapan daerah lainnya di Indonesia. Kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan kawasan itu terbatas, seperti sebagai penggerak perekonomian di Batam.

Gubernur Kepri diharapkan mampu mengontrol aktivitas perekonomian di Batam agar semakin berkembang.

"Kalau Kawasan Ekonomi Khusus ini selesai dibentuk, kewenangan berada di tangan gubernur. Investasi tidak hanya dilakukan swasta, melainkan juga dibebankan pada pemerintah," katanya.

Menurut dia, investor masih pro kontra terkait rencana pembubaran BP Batam. Namun untuk diketahui, kebijakan ini dilakukan untuk mengembangkan investasi dan optimalisasi pendapat negara.

"Dalam 10 tahun terakhir negara kehilangan pendapatan sekitar Rp20 triliun," katanya.

Dia mengatakan Presiden Joko Widodo menyetujui rencana tersebut, namun harus dilengkapi dengan regulasi yang tegas.

"Beliau (Presiden Jokowi) sangat-sangat setuju. Harus ada keberanian kalau menunggu revisi undang-undang butuh waktu lama," katanya.

/Ismed-Ant

Regulasi Tidak Jelas, Pungli DKE Rawan Diselewengkan

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi melihat ada upaya penyelewengan dana pungutan energi dari penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, pungutan tersebut bisa dikatakan pungutan liar (Pungli).

"Dalam UU Energi disebut 'depletion premium', bukan untuk memungut dana masyarakat dengan alasan dana ketahanan energi. Pungutan dana ketahanan energi dimaksud bisa dikatakan sebagai pungutan liar," kata Tulus Abadi dalam diskusi di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (29/12).



Dana Ketahanan Energi (DKE) yang akan dipungut berpotensi untuk disalahgunakan, untuk kepentingan kebijakan non-energi atau bahkan

kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan ketahanan energi, karena kelembagaan yang mengelola dana yang dipungut tersebut tidak jelas.

"Kalau nanti disatukan dengan dana APBN secara umum, maka potensi penyalahgunaannya sangat besar, selain itu *roadmap* tentang ketahanan energi yang dimaksud pemerintah juga belum jelas, bahkan mungkin tidak ada," tuturnya.

Lebih lanjut Tulus menjelaskan, dalam melakukan disinsentif terhadap energi fosil, seharusnya baru bisa diterapkan jika masyarakat sudah ada pilihan untuk menggunakan energi non fosil (energi baru terbarukan).

Oleh karena itu YLKI menuntut sebelum ada kejelasan hukum, maka pungutan dana ketahanan energi harus dibatalkan.

"Jangan bebani masyarakat dengan kebijakan yang belum jelas juntrungannya," pungkasnya. /Ismed

Indonesia Tolak Bergabung di Koalisi Militer Saudi

Indonesia menolak bergabung dalam koalisi militer Islam yang digalang Arab Saudi. Selain hal itu bertentangan dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia tak ingin terseret arus konflik perkubuan di Timur Tengah.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada pertengahan Desember 2015 mendadak jadi sibuk membuat bantahan di media. Retno bergegas membantah klaim sepihak dari Arab Saudi, bahwa Indonesia telah menjadi bagian dan mendukung pembentukan koalisi militer, yang terdiri atas 34 negara berpenduduk mayoritas Muslim. Koalisi yang digalang Saudi ini dimaksudkan untuk memerangi terorisme global.

“Negara-negara yang disebutkan di sini telah memutuskan untuk membentuk aliansi militer yang dipimpin Arab Saudi untuk melawan terorisme, dengan pusat operasi gabungan yang berbasis di Riyadh, untuk berkoordinasi dan mendukung operasi militer,” demikian pernyataan bersama yang dirilis kantor berita Arab Saudi, SPA, 15 Desember 2015.

Sejumlah 34 negara tersebut, di antaranya: Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Turki, Chad, Togo, Tunisia, Djibouti, Senegal, Sudan, Sierra Leone, Somalia, Gabon, Guinea, Palestina, Republik Federal Islam Comoro, Qatar, Cote d'Ivoire (Pantai Gading), Kuwait, Lebanon, Libya, Maladewa, Mali, Malaysia, Mesir, Maroko, Mauritania, Niger, Nigeria, serta Yaman.

Di dalam daftar tersebut memang tidak terdapat nama Indonesia, yang merupakan negara berpenduduk mayoritas

Muslim terbesar di dunia. Namun, dalam pernyataan itu disebutkan juga bahwa lebih dari 10 negara Muslim lainnya, termasuk Indonesia, telah menyatakan dukungan untuk koalisi ini.

“(Ada) kewajiban untuk melindungi negara-negara Muslim dari kejahatan seluruh kelompok dan organisasi teroris, apa pun sekte dan namanya, yang memicu kematian dan korupsi di bumi ini dan bertujuan meneror orang-orang tak bersalah,” tambah pernyataan tersebut.

Konsep yang Tidak Jelas

Dalam konferensi pers yang tergolong langka, Wakil Putra Mahkota dan Menteri Pertahanan Saudi, Mohammed bin Salman menjelaskan, kampanye ini akan mengkoordinasikan upaya memerangi terorisme di Irak, Suriah, Libya, Mesir dan Afganistan. Namun, Salman tidak menjelaskan secara rinci, bagaimana mekanisme kerja sama itu dan apa saja langkah konkret yang akan dilakukan agar aliansi militer itu bisa dijalankan.

Ketidakjelasan konsep ini menjadi alasan diplomatik dari pihak Indonesia untuk tidak bergabung

dalam aliansi militer yang digalang Saudi. Se jauh ini, Indonesia memang hanya mengirimkan pasukan ke luar negeri dalam konteks Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada Perang Teluk 1991, Indonesia menolak bergabung dalam pasukan multinasional yang dipimpin Amerika Serikat untuk menyerang Irak yang waktu itu dipimpin Presiden Saddam Hussein, karena pasukan itu tidak berdasarkan mandat dari PBB.

Pemerintah Indonesia juga mengaku bingung, kenapa Saudi secara sepihak sudah mengklaim negara-negara yang dianggap bergabung dengan koalisi mereka. Menlu Retno meminta Dubes Saudi mengirim prasyarat dan tujuan aliansi tersebut lebih dulu, sebelum menentukan sikap.

Saudi berjanji memberi penjelasan, namun jawaban Saudi belum diberikan pada pemerintah RI sejauh ini. “Kita tidak bisa melakukan komitmen terhadap satu kerja sama internasional, sebelum tahu detail bentuk dan modalitasnya,” kata juru bicara Kemlu Arrmanatha Nasir.

Penolakan serupa dinyatakan



Retno Marsudi

oleh Pakistan. Pakistan menegaskan, pihaknya tidak berniat ikut campur dalam koalisi negara mayoritas Muslim, yang digalang Saudi untuk memerangi kelompok ekstremis dan teroris global. Menteri Luar Negeri Pakistan Aizaz Chaudhry pada 16 Desember 2015 mengatakan, pihaknya tengah mempelajari rincian tentang koalisi militer itu.

“Memang betul, kami telah bekerja sama dengan Saudi dalam menangkalkan aksi teror. Namun saya tidak yakin Pakistan akan menjadi bagian dari aliansi militer tersebut,” kata Chaudhry. Pakistan dalam prinsipnya tidak pernah bergabung dalam aliansi militer apapun, tanpa adanya dukungan dari PBB. “Itu sebabnya kami menjauh dari konflik yang berkecamuk di Yaman,” tegasnya.

Malaysia Juga Belum Setuju

Malaysia ternyata juga belum setuju dengan format kerja sama militer yang ditawarkan Saudi. Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein mengaku, pihaknya mendukung gagasan bersatunya negara mayoritas Muslim untuk memerangi terorisme. “(Namun) prakarsa Arab tidak mencakup komitmen pengerahan militer,” katanya. Hussein mengisyaratkan, Malaysia tidak akan mengirim pasukan untuk bergabung dalam koalisi militer itu.

Pihak Saudi menyadari, tanpa dukungan meluas dari dunia internasional, aliansi militer ini hanya akan menjadi macan kertas yang tidak bergigi. “Akan ada koordinasi internasional dengan kekuatan dunia dan organisasi internasional ... dalam bentuk operasi di Suriah dan Irak. Kita tidak bisa menjalankan operasi ini tanpa koordinasi dengan legitimasi di wilayah tersebut dan komunitas internasional,” tutur Salman.

Namun, di sini juga terletak “jebakannya.” Ketika ditanya, apakah koalisi baru ini hanya akan fokus dalam memerangi kelompok ekstrem radikal ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) atau Negara Islam di Irak dan

Suriah, Salman menyatakan, koalisi ini tidak hanya menargetkan ISIS, tapi juga semua organisasi teroris yang ada. Padahal, sejauh ini tidak pernah ada kesepakatan tentang siapa saja yang bisa disebut “teroris” dan akan diperangi secara bersama-sama itu.

Dalam pembentukan aliansi militer ini, Saudi tidak mengajak dan melibatkan Iran, Suriah, Hizbullah Lebanon, dan Irak. Ini adalah pihak-pihak yang kebijakannya tidak sejalan dengan kepentingan Saudi di Timur Tengah. Saudi yang mayoritas penduduknya Muslim Sunni bersaing dengan Iran, yang mayoritas berpenduduk Muslim Syiah, dalam menebar pengaruh di kawasan Timur Tengah.

Saudi merasa khawatir dengan meluasnya pengaruh Iran di Yaman, Lebanon, Irak, dan Suriah. Saudi sibuk memerangi warga Houthi, warga Muslim Syiah di Yaman, yang menggulingkan penguasa tak populer Yaman yang didukung Saudi. Saudi juga memusuhi Presiden Suriah Bashar al-Assad, dan mendukung kelompok oposisi bersenjata yang ingin menggulingkan Assad. Iran sebaliknya justru mendukung Assad dalam melawan pemberontakan di dalam negeri, mendukung warga Houthi di Yaman, dan mendukung Hizbullah Lebanon dalam melawan Israel.

Patut diduga, bahwa yang dimaksud “teroris” oleh Saudi bukan cuma kelompok militan ISIS, tetapi juga kelompok-kelompok yang dianggap mendukung atau berafiliasi dengan Iran. Mereka antara lain seperti elemen-elemen pendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad, Hizbullah, Houthi, dan sebagainya.

Didukung di Dalam Negeri

Jika Indonesia terlibat dalam aliansi militer yang digalang Saudi, Indonesia akan terseret dalam tarik-menarik kepentingan dan persaingan pengaruh antar-kubu di Timur Tengah, yang petanya selalu berubah. Indonesia akan diperalat untuk kepentingan “petualangan politik” Saudi di Timur Tengah. Indonesia



juga berpotensi untuk dibenturkan dengan Iran, Suriah, Lebanon, dan Irak, yang dengan semua pihak itu sebetulnya Indonesia sudah memiliki hubungan yang baik.

Di dalam negeri, sikap pemerintah didukung oleh Ketua Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC), Din Syamsuddin. Tokoh Muhammadiyah ini setuju dengan sikap Indonesia, untuk tidak ikut campur dengan koalisi militer bentukan Arab Saudi, sebab hal itu akan menyalahi prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. “Saat ini Indonesia harus jadi penengah. Tidak usah ikut-ikutan, apalagi kalau hanya jadi pelengkap, nanti malah menderita,” ujar Din pada 17 Desember 2015.

Sedangkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, TNI tidak masuk dalam aliansi atau koalisi militer melawan terorisme dari kelompok ekstremis maupun ISIS. Sebab, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan, Indonesia tidak masuk dalam koalisi atau aliansi militer apa pun.

“Presiden bilang, semuanya dianalisis dulu. Jangan sampai gegabah ambil keputusan. Tapi yang jelas, kita ini kan dalam pembukaan UUD 45 bebas aktif. Jadi kita tidak akan masuk ke koalisi apa pun juga,” kata Gatot, se usai Rapat Pimpinan TNI 2015 di Mabes TNI, 18 Desember 2015. • Satrio Arismunandar

Penyakit kanker merupakan penyebab utama kedua kematian dan membunuh hampir lebih dari setengah juta orang setiap tahunnya. Sementara itu, industri farmasi yang meraup untung 100 miliar dolar AS setiap tahun tidak mampu menyembuhkan pasien penderita kanker.

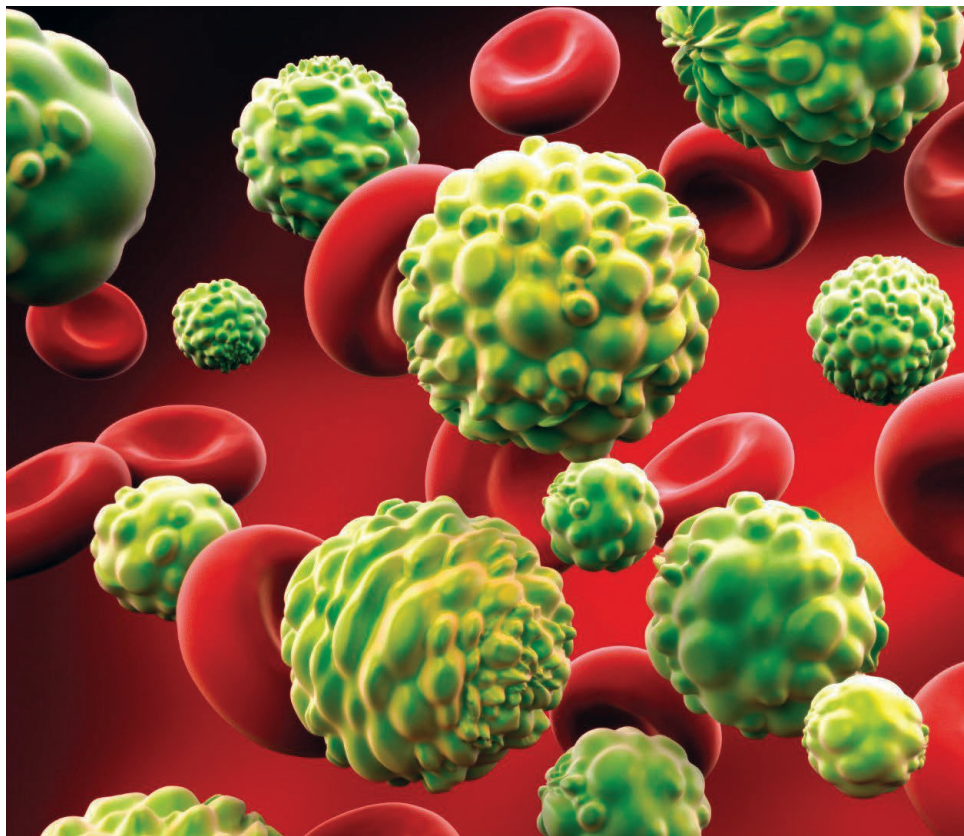
Namun, kasus ini tidak akan terjadi jika industri pengobatan kanker lebih tertarik dalam mencegah kanker ketimbang hanya menyembuhkan.

Kabar baiknya yaitu, ada cara alternatif untuk mencegah sekaligus menyembuhkan kanker, meskipun informasi ini masih belum bisa akurat seratus persen keberhasilannya.

Akurat 95 persen

Ahli medis yang sudah dibayar oleh perusahaan farmasi raksasa dunia kepada media nampaknya tidak begitu tertarik dalam memberikan “pelayanan”, kecuali itu menguntungkan atau menghasilkan bisnis yang berlipat ganda.

Salah satu metode dalam ‘mengalahkan’ kanker yakni deteksi dini. Bila tidak ada atau Anda tidak tertarik untuk mengikutinya, Anda harus melakukan pencitraan radiologi sebagai bagian dari pemeriksaan kanker tahunan Anda. Tujuannya, mencegah penimbunan kanker yang berlebih.



Cegah dan Sembuhkan Kanker dengan Metode AMAS

Saat ini ada metode sederhana dalam mencegah sekaligus menyembuhkan kanker yang disebut “AMAS Test” (Anti-Malignan Antibody Serum test), sangat bermanfaat untuk ‘skrining’ dan memonitor kanker. Yang terbaik dari cara ini yakni, relatif murah dalam hal biaya serta sangat akurat 95 persen.

Riset ini dikembangkan oleh Neurochemist Samuel Bogoch, MD, Ph.D. Dia mengatakan, bahwa tes AMAS dapat menentukan suatu kanker hadir di dalam tubuh manusia, karena menggunakan tes antibodi anti malignin, di mana sel tersebut diproduksi oleh seluruh jenis kanker.

Pengujian tes AMAS

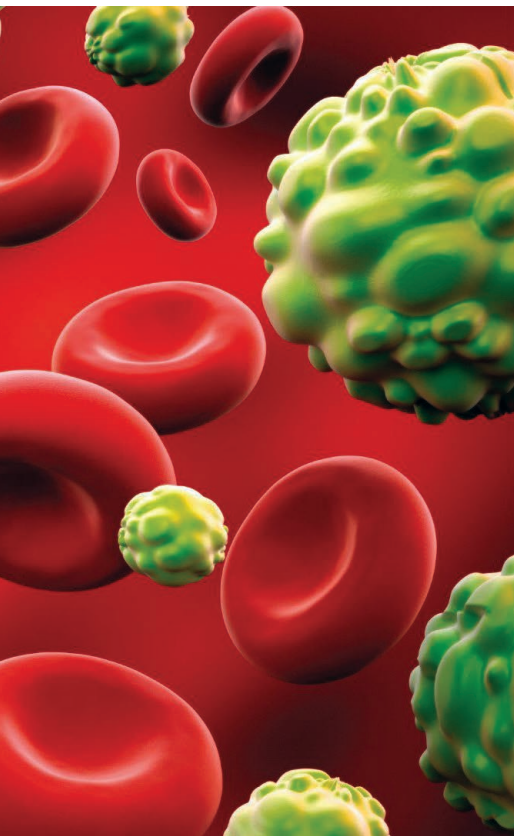
Ahli biokimia dan gizi, Timothy J. Smith, MD, menulis melalui salah satu karya bukunya “The GcMAF Book”, menjelaskan, tentang manfaat dari tes AMAS, serta bagaimana tes tersebut bekerja dalam tubuh manusia.

“Sistem kekebalan tubuh manusia mengenali protein antigenik pada permukaan sel-sel kanker, yang bernama ‘malignin’ diperkenalkan oleh dokter Bogoch,” kata Dr. Smith dalam Bab 13 dari bukunya tersebut.

“Ketika sistem kekebalan tubuh kita mengidentifikasi adanya malignin, mulai membuat antibodi anti-malignin.”

Untuk diketahui, Dr Smith telah mendedikasikan 40 tahun hidupnya untuk belajar dan mendalami

Timothy J. Smith



Sel Kanker

mempunyai sistem kekebalan tubuh yang lemah, sel-sel kanker akan mereplikasi di luar kontrol (luar kendali), sehingga tingkat AMAS yang akan naik melampaui titik dasar dari 135, di mana menunjukkan bahwa sistem kekebalan tubuh tidak bekerja cukup memadai, sehingga mengakibatkan pertumbuhan kanker.

"Titik *cut off* untuk Amas positif yaitu 135," tulis Dr. Smith.

"Lebih dari 99 persen pasien dengan riwayat kanker memiliki tingkat AMAS di atas 135. Tingkat Amas bawah 135 terlihat pada individu normal yang tidak memiliki kanker."

Selain 'skrining' untuk jenis kanker, AMAS juga dapat memantau keberadaan kanker selama pengobatan.

Sebelumnya, dokter konvensional pada umumnya tidak menyukai tes ini lantaran tidak dapat mendeteksi

jenis atau lokasi kanker di dalam tubuh. Nampaknya, hal ini tidak terlalu bermasalah dalam pengobatan kanker alternatif. Karena AMAS secara khusus menargetkan sel-sel kanker, sehingga melindungi sel-sel dan jaringan tubuh yang sehat.

Sementara itu, studi ilmiah berdasarkan AMAS telah menemukan bahwa puluhan peneliti dan pusat penelitian medis secara meyakinkan menunjukkan nilai positif sebagai metode 'skrining' dalam deteksi dini kanker.

Tes AMAS tak hanya mampu mendeteksi kanker pada tingkat yang sangat rendah, tetapi juga bias menggantikan metode deteksi berbahaya tindak lanjut yang menggunakan pencitraan radiologi seperti CT scan, MRI atau sinar-X.

Perlu untuk diketahui, bahwa pembuat AMAS merekomendasikan tes untuk digunakan dalam konteks penilaian klinis baik oleh dokter yang berpengalaman dalam pengobatan kanker atau kepada ahli Naturopath. ◻ Ferro Maulana

penyembuhan alternatif, prinsip penyembuhan gizi dan konvensional, dan terakhir berperan penting dalam memperkenalkan akupunktur untuk perkumpulan ahli medis Amerika di awal era 70-an.

Dia menulis beberapa buku yang fokus terhadap mencegah dan menangani penyakit umum secara alami. Seperti penyakit jantung dan kanker.

Biaya tes AMAS. Dalam tahap awal, tes AMAS dilakukan secara gratis. Tapi sebenarnya, biaya untuk tes ini sekitar 165 dolar AS, tidak termasuk biaya konsultasi dengan dokter.

Dr Smith kembali menjelaskan, bahwa tubuh manusia akan menghasilkan sel-sel kanker, yang berarti antibodi dan anti-malignin hadir pada tingkat rendah di setiap orang. Namun, sistem kekebalan tubuh yang sehat secara aktif akan menghancurkan sel-sel kanker yang terbentuk.

Tapi pada manusia yang

Berikut pola kerja tes AMAS dalam mencegah dan mengobati penyakit kanker:

1. AMAS, mengandung antibodi alami dalam serum bagus diperuntukkan untuk semua orang, termasuk anak-anak.
2. Tes AMAS begitu akurat mendeteksi semua jenis kanker secara dini.
3. Uji klinis AMAS positif bagi semua jenis kanker di seluruh bagian tubuh manusia.
4. Metode AMAS sangat akurat 95 persen. Jika diulangi, akurasi meningkat menjadi sampai 99 persen.
5. Tes AMAS adalah antikanker dan antibodi yang muncul pertama kali dalam tubuh manusia.
6. AMAS mendeteksi kanker lebih teliti dibandingkan alat pencitraan medis kanker lainnya.
7. AMAS mendeteksi kanker sangat awal. Dan, dalam faktanya, dokter Anda mungkin belum dapat menemukan kanker dengan alat pencitraan yang canggih.
8. Deteksi dini mampu meningkatkan kemampuan obat yang permanen
9. AMAS menjadi awal pengobatan kanker yang sukses.
10. Tes AMAS secara normal pada pasien kanker yang ganas berhasil sembuh.

Handphone Tertua 800 Tahun 'Gemparkan' Dunia



Temuan arkeologi yang memiliki kemiripan dengan *handphone* tahun 1990 menyebabkan banyak perdebatan dan diskusi antar ilmuwan atau peneliti dunia.

Fokus utama kajian penelitian terhadap objek *handphone* kuno itu

identik dengan paku, sistem tulisan yang digunakan oleh bangsa Sumeria kuno Mesopotamia (Irak Modern) sekitar 3000 SM (Sebelum Masehi).

Sejumlah situs teori konspirasi telah me-*posting* tentang rincian terkait gambar yang sangat unik

dalam beberapa hari terakhir, di mana klaim itu ditemukan selama penggalian di Austria, pada awal tahun ini.

Tetapi, seluruh rincian foto itu pernah di-*posting* di situs berbagi foto Flickr di bulan Januari 2012 lalu, dengan klaim yang sama.

Namun sayang, dalam postingan tersebut, tidak ada rincian yang diberikan tentang kapan penggalian itu berlangsung atau siapa saja yang terlibat dalam penemuan tersebut.

Dalam postingan terbaru menyebutkan, bahwa penggalian dilakukan di wilayah Fuschl am See di Salzburg.

Banyak Netizen merespon postingan foto *handphone* berusia 800 tahun itu dengan mengatakan, "Hal itu merupakan tipuan dunia maya."

Banyak komentar lucu Netizen yang mengatakan, "Saya yakin itu hal yang mengerikan.". Sedangkan, Netizen lain mengatakan, "Mungkin ada lima panggilan tak terjawab dari Chuck Norris di layarnya.". (Sumber: Mirror.Co.Uk, Metro.Co.Uk). /Ferro Maulana

Pohon Tertua di Dunia Ditemukan!

Pohon tertua di seluruh dunia yang diberi nama julukan "Old Tjikko" yang diperkirakan berusia 9.500 tahun sukses ditemukan oleh Profesor Leif Kullman.

Pohon yang menyerupai 'serak Siberia' ini sebenarnya berasal dari daratan Norwegia, namun dikembangbiakkan di Swedia.

Pohon ini ditemukan pada tahun 2004 lalu oleh Profesor Kullman, ilmuwan fisika geografi dari Umea University.

Diperkirakan usia pohon tersebut, ditelaah atau diteliti menggunakan zat carbon-14.

"Selama di permukaan laut pada zaman es pohon ini mempunyai tinggi 120 meter. Namun hari ini tinggi pohon itu lebih rendah. Yang kita lihat sekarang, merupakan Laut Utara di antara perairan antara Inggris dan Norwegia. Dan, kala itu merupakan sebuah hutan," kata profesor Kullman.

Dengan angin dan suhu rendah saat ini menjadikan 'Old Tjikko' mirip seperti pohon bonsai-di mana pohon besar tidak bisa setua ini.

ini. / Ferro Maulana Sumber: Bored Panda, National Geographic, New York Times





Ditulis Sahabat Rasulullah SAW, Jejak Al Quran di Eropa

Al Quran merupakan Kitab Suci umat Islam. Al Quran lah yang menjadi pedoman manusia dalam menjalankan perintah Allah SWT di muka Bumi ini. Namun siapa sangka bahwa Kitab Suci umat Islam ini justru ditemukan di salah satu negara dengan Islam minoritas.

Beberapa waktu lalu, telah ditemukannya penggalan manuskrip Al Quran tertua, berusia sekitar 1370 tahun, di Universitas Birmingham, Inggris. Ini memiliki makna sangat penting bagi dunia Islam.

Universitas Birmingham selama ini dikenal sebagai salah satu Universitas yang giat mengumpulkan manuskrip kuno dunia Islam. Manuskrip Al Quran tertua itu sebenarnya sudah bertahun-tahun berada dalam koleksi dokumen yang berasal dari Timur Tengah yang jumlahnya mencapai 3000 buah.

Sebagian besar dokumen terutama didapat Alphonse Mingana, Pendeta Kasdim yang lahir dekat kota Mosul di Irak, pada 1920.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana Al Quran tertua tersebut sampai di kota Birmingham, Inggris?

Para ilmuwan meyakini bahwa lembaran Al Quran di Birmingham, yang ditulis di atas kulit binatang, sama dengan manuskrip yang disimpan di Perpustakaan Nasional Prancis. Ilmuwan-ilmuwan yang meyakini

kesimpulan tersebut di antaranya adalah ahli sejarah Al Quran, Francois Deroche, yang bekerja di College de Grance dan Alba Fedeli, peneliti yang pertama kali menemukan keberadaan Al Quran di Birmingham.

Deroche menjelaskan bahwa manuskrip Al Quran klasik yang tersimpan di Paris berasal dari koleksi Al Quran di Masjid Amr bin Ash di kota Fustat, Mesir, yang sekarang masuk kawasan Kairo. Amr bin Ash adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang berjasa menyebarkan Islam di Mesir.

Menurutnya, itu terjadi pada abad 19 dimana Al Quran di Masjid Amr bin Ash dipindahkan ke perpustakaan Nasional di Kairo.

“Pada abad ke-19, Quran dari Masjid Amr bin Ash di Fustat dipindahkan ke Perpustakaan Nasional di Kairo dan dalam proses transfer inilah sejumlah lembaran Quran tersebut “hilang” dan masuk ke pasar benda-benda kuno,” Terang Deroche

Setelah beberapa kali berpindah tangan, beberapa lembar di antaranya dibeli oleh Alphonse Mingana pada 1920-an dan dibawa ke Birmingham. Mingana beradal dari Assyria (sekarang menjadi bagian dari negara Irak) yang melakukan perjalanan ke Timur Tengah atas biaya dari Keluarga Cadbury di Inggris.

Ketika itu Deroche mengatakan,

“kemungkinan lembaran-lembaran lain dari Quran yang hilang dari Masjid Amr bin Ash suatu saat nanti ditemukan,” ungkap Deroche

Manuskrip Al Quran tertua yang ada di Birmingham yang hanya terdiri dari dua lembar ini telah dilakukan uji radiokarbon oleh tim Universitas Oxford yang mengatakan tingkat akurasi pengujian mereka 95 persen. Mereka mengatakan bahwa usia Al Quran tersebut, berasal dari era tahun 568 hingga 645, 13 tahun setelah Nabi Muhammad wafat.

David Thomas, Guru Besar kajian Kristen dan Islam di Universitas Birmingham mengatakan bahwa kemungkinan orang yang menulis Al Quran tersebut hidup di zaman Rasulullah SAW dan mengenal Beliau.

“Orang yang menulis manuskrip tersebut bisa jadi hidup di zaman Nabi Muhammad SAW dan ia mengenal Nabi,” ujar Thomas.

Thomas juga memperkirakan bahwa Al Quran tersebut kemungkinan terdiri dari 200 lembar. Namun yang ditemukan di Birmingham hanya dua lembar saja.

Direktur lembaga pendidikan Yayasan Mohammed bin Rashid Al Maktoum di Uni Emirat Arab, Jamal bin Huwareib, mengatakan lembaran Quran di Birmingham adalah bagian dari Quran yang ditulis ulang oleh Abu Bakar, sahabat Nabi Muhammad yang menjadi Khalifah pada 632 hingga 634.

“Saya yakin ini berasal dari zaman sahabat Abu Bakar,” kata Huwareib setelah melihat sendiri manuskrip di Birmingham.

Para ahli mengatakan perlu penelitian yang lebih mendalam untuk menentukan secara persis dari era mana Quran ini berasal, tapi apa pun kesimpulannya Quran di Birmingham jelas punya makna yang sangat penting dan mendalam.

“Quran di Birmingham tak ternilai harganya. Keberadaanya di Birmingham, bukan di negara Muslim, mengirim pesan tentang saling toleransi antarumat beragama,” kata Huwareib.

/Ferro Maulana Sumber: BBC.Co.Uk, Daily Mail

Menghadirkan Ruh Salvador Allende

Hendrajit

J biasanya dosa politik politisi adalah ingkar janji. Tapi Presiden Chile, Salvador Allende, yang memenangi pemilu presiden pada 1973, punya dosa politik yang lain, yaitu mewujudkan janji kampanyenya, yaitu menasionalisasi seluruh sumberdaya alam jadi milik seluruh rakyat Chile. Menasionalisasi industri tembaga, batubara dan baja milik asing, juga 60 persen bank swasta.

Bagi Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dan CIA yang mewakili hajatan perusahaan-perusahaan raksasa AS, kemudian menggalang konspirasi dengan militer Chile menggulingkan dan membunuh presiden terpilih yang menang secara demokratis itu.

Namun pada 2005, dua dasawarsa kemudian, ruh Allende seakan hadir kembali tidak saja di Chile, bahkan di negara-negara kawasan Amerika Latin. Selain Hugo Chavez-Venezuela, Luiz Inacio Lula da Silva-Brazil, maupun Nestor Kischner-Argentina, dan Tabare Ramon Vazquez-Uruguay, berhasil memenangkan pemilu. Mereka menentang dan mengungkap adanya korporatokrasi dan eksploitasi AS lewat berbagai perusahaan asing.

Presiden-presiden baru itu merupakan para nasionalis yang bertekad memanfaatkan sumberdaya alam negaranya untuk membantu rakyatnya bangkit dari kemiskinan. Jalan cerita keberhasilan Chavez, mungkin bisa mewakili kebangkitan kembali ruh Allende sebagai inspirasi untuk meluncurkan sebuah revolusi kerakyatan yang secara skematik dan terencana. Baik pematangan gagasan maupun dalam penggalangan kekuatan nasional yang mengakar dan meluas dari berbagai komponen bangsa.

Ketenaran Chavez bermula pada Februari 1992, ketika sebagai Letnan Kolonel di angkatan bersenjata Venezuela, ia memimpin kudeta melawan Presiden Carlos Andres Perez yang berhaluan neoliberal pro AS, korup, dan begitu gampangnya menjual negara kepada Bank Dunia, IMF dan korporasi asing. Sedemikian rupa parahnya presiden sipil tapi bobrok ini, sehingga pendapatan per kapita Venezuela sempat anjlok sampai 40 persen. Sehingga negara yang sempat dikagumi sebagai kelas menengah terbesar di Amerika Latin itu, di era pemerintahan Perez benar-benar berada pada tingkat kemiskinan yang cukup mengkhawatirkan.

Kudeta yang coba-coba dilancarkan Chavez memang gagal akhirnya, tapi perjuangan itu justru membuka jalan cerita baru bagi karir politik Chavez di masa depan. Setelah ditangkap dan dicopot dari kesatuan militer, dan jadi sipil kembali, justru segalanya dimulai. Keberaniannya untuk melawan kebatilan dan penjajahan asing melalui komprador-korporadornya dalam pemerintahan Perez, telah melambungkan ketenarannya di seantero negeri. Sehingga masyarakat Venezuela memandang Chavez sebagai pemimpin bangsa yang punya karakter dan penuh integritas.

Setelah menjalani masa tahanan dua tahun di penjara Yare, kemunculan Chavez di pentas politik Venezuela dalam mengumandangkan perjuangan untuk menghancurkan belenggu

eksploitasi asing dan komitmennya membantu rakyat miskin, dengan mudah telah memikat hati masyarakat.

Maka ketika pada 1998 Chavez mencalonkan diri sebagai presiden Venezuela melalui pemilu demokratis, perolehan suara yang diraihnyanya sangat mengesankan, 56 persen. Yang lebih menakutkan lagi, begitu duduk di singgasanan kepresidenan ia tidak tunduk pada korupsi seperti politisi-politisi sebelumnya. Sebaliknya, Chavez justru mengikuti jalan yang ditempuh Salvador Allende, Presiden Guatemala Jacobo Arbez Guzman, maupun Torrijos dari Panama.

Tentu saja bukan meniru mentah-mentah para pendahulunya itu, melainkan menyerap inspirasi dari kekuatan kepribadian kepemimpinan para leluhurnya itu. Sebagai landasan untuk menyusun visi kepemimpinannya sendiri sebagai kepala pemerintahan Venezuela. Namun tetap diilhami oleh para presiden pendahulunya itu untuk tetap menentang secara terus-menerus berbagai kebijakan ekonomi Washington maupun sepak-terjang perusahaan-perusahaan minyak AS.

Alih-alih memasukkan kembali profit ke industri minyak, ia menginvestasikannya ke proyek-proyek yang bertujuan memerangi buta huruf, gizi buruk, penyakit, dan masalah sosial lainnya. Alih-alih mengesahkan pembayaran dividen yang besar kepada investor, ia membantu Presiden Kichner dari Argentina yang sudah siap berperang itu untuk melunasi utang-utang bangsanya kepada IMF sebesar lebih dari 10 milyar dolar AS.

Ia juga menjual minyak dengan harga diskon kepada mereka yang tidak bisa membayar akibat harga yang melambung. Sebagian pendapatan dari minyak ia sisihkan untuk Kuba agar bisa mengirimkan dokter ke wilayah miskin.

Chavez juga merancang hukum yang tidak mengabaikan hak-hak rakyat pribumi, termasuk bahasa dan hak kepemilikan tanah, dan berjuang demi menetapkan kurikulum Afro-Venezuela di sekolah-sekolah negeri.

Seperti halnya Allende, AS dan korporatokrasi memandang Chavez sebagai ancaman. Maka disusunlah operasi intelijen menggulingkan Chavez pada 11 April 2002. Operasi intelijen CIA berhasil menggerakkan ribuan orang turun ke jalan-jalan Caracas. Mereka berbaris menuju markas perusahaan minyak negara dan ke Niraflores, istana presiden. Tiba-tiba, angkatan bersenjata mengumumkan bahwa Chavez telah mundur dari kursi kepresidenan dan ditahan di pangkalan militer.

Washington tentu saja bergembira, tapi hanya dalam 2 kali 24 jam, tentara yang setia pada Chavez menggelar serangan balasan dan pada 13 April, Chavez kembali memegang jabatannya.

Gagalnya percobaan kudeta yang dilancarkan AS dan CIA, bukan karena tentara yang setia pada Chavez lebih kuat atau lebih cerdas. Melainkan karena Chavez sudah membangun kekuatan yang mengakar melalui apa yang dinamakan Lingkaran Bolivarian, yang menciptakan keterhubungan antara elemen-elemen yang ada di dalam pemerintahan maupun yang berkegiatan di luar pemerintahan. ◊

AKTUAL

Berani
Beda
Karena
Benar



INFO & PEMASARAN

☎ Dedy **081 20 53 8776**
Ranie **081 38 210 44 69**
Rhiza **081 828 0941 009**
✉ marketing@aktual.com
iklan@aktual.com

www.aktual.com

memberi anda
perspektif
yang berbeda ...



aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

AKTUAL
MAGAZINE

aktual 

Info Dan Pemasaran :

 **081517933376** (Dedy)

081280941009 (Rhiza)

 **iklan@aktual.com**

marketing@aktual.com | **sirkulasi@aktual.com**

 **www.aktual.com**